



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Veteran Nomor 2, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara 20714  
Telepon (061) 8821860 Laman inspektorat.binjaikota.go.id

Binjai, 31 Maret 2026

Nomor : Itko.130/LHR/III/2016/Rhs  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Tahun 2025 Kota Binjai

Kepada :

Yth. Wali Kota Binjai  
c/q. Sekretaris Daerah Kota Binjai  
di-

Binjai

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Binjai Nomor 800.1.11.1/222/ITKO/III/2026 tanggal 6 Maret 2026 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai, bersama ini disampaikan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 Kota Binjai. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.2.7/989/OTD tanggal 12 Februari 2026 dengan hasil sebagai berikut:

**A. Pernyataan Telah Direviu**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Binjai untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu.....

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini.

#### B. Dasar Reviu

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai No.4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
4. Peraturan Walikota Binjai No.28 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Binjai;
5. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) Inspektorat Daerah Kota Binjai Tahun 2026;
6. Surat Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 100.1-236/BAG.Pem/II/2026 tanggal 5 Maret 2026 perihal Laporan.
7. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Binjai Nomor 800.1.11.1/222/ITKO/III/2026 tanggal 6 Maret 2026 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai.

#### C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Binjai T.A 2025 dilaksanakan mulai tanggal 09 s/d 31 Maret 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan : 09 s.d 11 Maret 2026, 3 (tiga) hari kelender;
2. Pelaksanaan : 12 s.d 26 Maret, 6 (enam) hari kelender;
3. Pelaporan : 27 s.d 31 Maret, 3 (tiga) hari kelender.

D. Susunan.....

#### D. Susunan Tim Reviu

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab              | : Heny Sri Dewi Sitepu, SE, M.SP                     |
| 2. Wakil Penanggung Jawab Teknis | : Dupien Asido Marganti, ST, M.Si                    |
| 3. Pengendali Teknis             | : Tiolina Br. Bangun, SE                             |
| 4. Ketua Tim                     | : Endang Purtaminingsih, ST, MM                      |
| 5. Anggota Tim                   | : Nelly Hapsari, SE, M.Si<br>Edi Pimanta Tarigan, SH |

#### E. Ruang Lingkup Pelaksanaan Reviu

##### 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

##### a.1. Capaian kinerja makro

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Data Capaian IPM Kota Binjai pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah disajikan pada Bab II Rancangan LPPD Kota Binjai Tahun 2025, data pencapaian IPM Kota Binjai Tahun 2025 sebesar 79,2 naik 0,53 dari angka 76,01 pada Tahun 2025 telah sesuai dengan data resmi dari BPS Tahun 2026.
- Persentase Penduduk Miskin  
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2025 Kota Binjai telah disajikan pada Bab II, Garis kemiskinan di Kota Binjai mengalami peningkatan . Pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin 13.860 orang dan ditahun 2025 jumlah penduduk miskin sebanyak 13.870 orang
- Tingkat Pengangguran Terbuka  
Angka Pengangguran Terbuka Kota Binjai mengalami penurunan sebesar 0,07 dari angka 5,44 Tahun 2024 menjadi 5,37 Tahun 2025, sesuai dengan data resmi dari BPS Tahun 2026.
- Pertumbuhan Ekonomi  
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai mengalami peningkatan sebesar 105.561 Tahun 2024 sebesar 15.588,75 milyar dan Tahun 2025 sebesar 16.644,36 milyar sesuai dengan data resmi dari BPS Tahun 2026

Pendapatan.....

- **Pendapatan Perkapita**  
Pendapatan Per Kapita Kota Binjai Tahun 2025 naik sebesar 473.567, Tahun 2024 sebesar 73574,62 Tahun 2025 menjadi 473.567 sesuai dengan data resmi dari BPS Tahun 2026.
- **Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)**  
Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) Kota Binjai 2024 naik sebesar 0,0018. Pada Tahun 2025 sebesar 0,32 poin dan Tahun 2024 menjadi 0,312 poin, sesuai data BPS tahun 2026.

a.2. **Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.**

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Binjai Tahun 2025 telah diukur dari indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pemerintahan Kota Binjai. Namun masih terdapat indikator kinerja yang belum disajikan lengkap pada IKK

a.3. **Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.**

Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Binjai telah mengacu pada Visi dan Misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Kota Binjai Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) **Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan**

Kota Binjai tahun 2025 tidak mendapat Tugas Pembantuan Pusat ke Pemerintah Kota Binjai.

3) **Capaian .....**

### 3) Capaian kinerja penerapan standar pelayanan minimal

- Capaian penerapan standar pelayanan minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Penjelasan pada angka (3) Urusan Pemerintahan " Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat".

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri terkait untuk Penerapan SPM pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial telah disajikan dalam LPPD sesuai target dan realisasinya.

- Kendala penerapan standar pelayanan minimal

Adapun kendala dalam penerapan pencapaian standar pelayanan minimal telah diuraikan dalam permasalahan dan solusi sesuai kebijakan masing-masing yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal telah disajikan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Binjai.

- Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

Terkait penerapan standar pelayanan minimal terdapat Perangkat Daerah yang **belum menyediakan anggaran** yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai dengan SPM "*Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani dan Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.*

F. Hasil Reviu.....

## F. Hasil Reviu

### a. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika draf LPPD

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terdapat perbaikan sistematika penyusunan laporan pada Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya pada poin 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Penyajian materi dan sistematika pada dasarnya telah sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.7/989/OTD tanggal 12 Februari 2026 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

### b. Pencermatan data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK (Indikator Kinerja Kunci) atas :

#### a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan

Tim Reviu APIP Kota telah melakukan reviu atas kebenaran dan akurasi perhitungan serta sumber data yang disajikan dalam rancangan LPPD. Untuk bobot nilai perbidang urusan telah disajikan dan telah didukung oleh bukti data/dokumen, namun Pemerintah Kota Binjai belum memiliki data tenaga kerja konstruksi terlatih yang didukung dengan sertifikat kompetensi.

#### b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan

Hasil reviu terhadap Capaian kinerja IKK urusan pemerintahan telah dapat diyakini dan data telah terpenuhi secara memadai.

## G. Simpulan dan Rekomendasi

### a. Simpulan

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan:

1. Terdapat beberapa data yang dimasukkan dalam bentuk surat pernyataan

Pada capaian.....

pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena data tersebut tidak tersedia / dianggarkan pada Perangkat Daerah sebagai pengampu kegiatan IKK.

- Data dan Informasi yang disajikan belum lengkap sebagai berikut:

No	Kategori Urusan	Urusan	IKK	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan pelayanan dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Data pembilang tidak terpenuhi
			Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Data pembilang dan penyebut pada IKK tidak terpenuhi
		Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Data pembilang dan penyebut pada IKK tidak terpenuhi
			Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Data pembilang dan penyebut pada IKK tidak terpenuhi

		Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Data pembilang dan penyebut pada IKK tidak terpenuhi
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Data pembilang tidak terpenuhi

- Terdapat Perangkat Daerah yang menyajikan surat pernyataan dikarenakan **tidak tersedianya anggaran** yaitu

1. Pada urusan Pemerintahan Wajib berkaitan pelayanan dasar untuk *urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai* dengan IKK "*Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani, Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani dan Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;*

2. Pada Urusan.....

2. Pada urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan IKK "Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
3. Pada urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar untuk Urusan Tenaga Kerja dengan IKK "Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja".

b. Rekomendasi

1. Perangkat Daerah lebih cepat merespon permintaan dan melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sesuai Indikator Kinerja Kunci Hasil yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah dalam menyajikan dan melengkapi informasi pada data Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025;
2. Berkoordinasi dengan TAPD, Bappeda, dan DPRD untuk mengusulkan penambahan atau penyesuaian anggaran pada perubahan atau tahun anggaran berikutnya terkait ketidakterediaan anggaran pada pemenuhan indikator kinerja kunci (IKK) pada urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2028 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 14 poin 2 "Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

H. Penutup.....

#### H. Penutup

Inspektorat Daerah Kota Binjai mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025.

Demikian Laporan Hasil Reviu ini kami sampaikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

INSPEKTUR DAERAH



HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP  
PEMBINA T K J A  
NIP. 19770312 199602 2 001



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH  
KOTA BINJAI  
2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan Karunia – Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Binjai Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Binjai Tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Khususnya Pasal 69 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.7/989/OTDA tanggal 12 Februari 2026 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah merupakan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah dengan ruang lingkup yang dapat disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, berisikan Dasar Hukum, Gambaran Umum Daerah, Kondisi Geografis Daerah, Gambaran Umum Demografis, Kondisi Ekonomi, Program Pembangunan Daerah dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal.
- BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, meliputi : Capaian Kinerja Makro, Indikator Kinerja Kunci dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.
- BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN, yang memuat pelaksanaan tugas pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.
- BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, yang meliputi laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari 6 (enam) Urusan : Urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum,

Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Urusan Sosial.

## BAB V PENUTUP

Kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025 ini bisa menyajikan secara nyata atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Binjai dengan semua indikator atas urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Binjai selama pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dari RPJMD Kota Binjai Tahun 2025 – 2029, terutama setelah mendapat evaluasi dari Pemerintah disertai harapan nantinya Kota Binjai memperoleh hasil peringkat, skor dan status kinerja yang lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2025, saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi – tingginya kepada segenap anggota DPRD Kota Binjai, Unsur FKPD Kota Binjai, Instansi Pemerintahan yang ada di Kota Binjai dan seluruh elemen Masyarakat Kota Binjai. Atas dukungan dan partisipasinya yang telah diwujudkan dengan baik selama ini. Dukungan tersebut tetap kami harapkan kedepan dalam rangka kesinambungan pembangunan dan dalam upaya kemajuan Daerah serta kesejahteraan Masyarakat, terutama untuk mencapai tahun Prestasi di akhir masa RPJMD Kota Binjai Tahun 2025 – 2029.

Kami juga tetap mengharapkan masukan dan arahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Semua pihak dalam rangka peningkatan daya saing dan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Binjai di Kota Binjai di masa – masa mendatang.

Akhirnya, semoga kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan Rahmat dan Karunia – Nya untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Kota Binjai, Bangsa dan Negara tercinta.

Binjai, 31 Maret 2026

  
**WALI KOTA BINJAI**  
**Drs. H. AMIR HAMZAH, M. AP**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah .....	1
b. Data Geografis Daerah .....	2
c. Jumlah Penduduk .....	3
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan .....	3
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah .....	3
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	21
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....	21
b. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	29
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah .....	32
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	56
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	69

## **BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

.....	77
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	77
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	77
2. Angka Kemiskinan .....	78
3. Angka Pengangguran .....	78
4. Pertumbuhan Ekonomi .....	79
5. Pendapatan Perkapita .....	80
6. Ketimpangan Pendapatan .....	81
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan .....	82
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	82
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	87
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pilihan .....	91
2.2.4 Indikator Kinerja Kunci Untuk Penunjang Urusan Pemerintahan .....	93
2.2.5 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	94

## **BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN .....**

1. Dasar Hukum, Gambaran Umum dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	114
2. Tugas Pembantuan Pusat Kepada Daerah Kabupaten/Kota .....	114

<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	115
4.1 Urusan Pendidikan .....	115
4.2 Urusan Kesehatan .....	118
4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....	124
4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....	127
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	129
4.6 Urusan Sosial .....	134
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	138

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1. 1. 1 Penjelasan Umum**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud kepatuhan Kepala Daerah pada peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 69 Khususnya Pasal 69 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.7/989/OTDA tanggal 12 Februari 2026 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Kota Binjai Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

#### **a. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH KOTA BINJAI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara terbentuklah Kota Binjai sebagai Otonom Kota Praja. Selanjutnya dalam perkembangannya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Binjai, Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk. II Deli Serdang.

## b. DATA GEOGRAFIS DAERAH

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Binjai, Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk. II Deli Serdang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Batas daerah Kabupaten Langkat Dengan Kota Binjai Dan Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang Dengan Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara.

Batas Wilayah Kota Binjai dengan daerah-daerah sekitar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Binjai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang)
- Sebelah Timur : Kecamatan Sunggal (Kabupaten Deli Serdang)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Bingai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Kutalimbaru (Kabupaten Deli Serdang)
- Sebelah Barat : Kecamatan Selesai (Kabupaten Langkat)

Wilayah Kota Binjai dibagi atas 5 (lima) Kecamatan dengan rincian luas sebagai berikut :

Tabel 1. 1

Luas Wilayah Kota Binjai Dirinci PerKecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	HA	%
1	2	3	4	5	6
1	Binjai Selatan	8	29,96	2.996,50	33,21
2	Binjai Timur	7	21,92	2.192,00	24,05
3	Binjai Kota	7	4,12	412,00	4,57
4	Binjai Utara	9	23,59	2.359,12	26,14
5	Binjai Barat	6	10,86	1.086,00	12,03
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>90,45</b>	<b>9.045,62</b>	<b>100</b>

Secara Geografis Kota Binjai terletak diantara 3°31;40" - 3°40'2" Lintang Utara, dan 98° 27'3" - 98°32'32" Bujur Timur. Luas Wilayah Kota Binjai 9.023,62 Ha (90,23 km<sup>2</sup>). Kota Binjai berada pada ketinggian 25-35 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 28 meter di atas

permukaan laut. Sekitar 8.739,72 Ha (96,82%) dari wilayah Kota Binjai adalah daerah datar dengan tingkat kemiringan lahan 0 s/d 2 % sedang sisanya sekitar 283,90 Ha (3,18%) memiliki tingkat kemiringan lahan antara 2 % s/d 15 %.

**c. JUMLAH PENDUDUK**

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, Jumlah penduduk tahun 2025 adalah sejumlah 310.932 jiwa dengan rincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 155.462 jiwa dan perempuan 155.470 jiwa.

**d. JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk. II Deli Serdang, wilayah Kota Binjai bertambah luas menjadi 90,23 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi atas 5 (lima) wilayah pemerintah Kecamatan, 11 (sebelas) Desa dan 19 (sembilan belas) Kelurahan. Selanjutnya, pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tentang Pembentukan 6 (enam) Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai, jumlah Desa menjadi 17 (tujuh belas) dan Kelurahan menjadi 20 (dua puluh). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 146/2624/SK/1996 tanggal 17 Agustus 1996, 17 (tujuh belas) Desa di Kota Binjai berubah menjadi Kelurahan sehingga jumlah Kelurahan yang ada menjadi 37 (tiga puluh tujuh). Sampai dengan tahun 2017, secara administrative Kota Binjai terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan dan 284 (dua ratus delapan puluh empat) Lingkungan.

**e. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH**

Tabel 1. 2

PERANGKAT DAERAH & UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Perda Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023

	a. Bagian Pemerintahan	
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	c. Bagian Hukum	
	d. Bagian Perekonomian	
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	
	f. Bagian Organisasi	
	g. Bagian Protokol & Kepemimpinan	
	h. Bagian Umum	
	i. Bagian Barang Dan Jasa	
2.	Sekretariat DPRD	sda
3.	Inspektorat Daerah Kota	sda
4.	RSUD. DR. RM, Djoelhaam	sda
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	sda
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	sda
7.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sda
8.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	sda
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	sda
10.	Dinas Pendidikan	sda
11.	Dinas Kesehatan	sda
12.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	sda
13.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	sda
14.	Dinas Sosial	sda
15.	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan	sda
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat	sda
17.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	sda
18.	Dinas Ketahanan Pangan Dan	sda

	Pertanian	
19.	Dinas Lingkungan Hidup	sda
20.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	sda
21.	Dinas Perhubungan	sda
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	sda
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	sda
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	sda
25.	Dinas Perpustakaan	sda
26.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	sda
27.	Dinas Pariwisata	sda
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	sda
29.	Kecamatan Binjai Utara	sda
	a. Kelurahan Pahlawan	
	b. Kelurahan Jati Negara	
	c. Kelurahan Nangka	
	d. Kelurahan Damai	
	e. Kelurahan Kebun Lada	
	f. Kelurahan Cengkeh Turi	
	g. Kelurahan Jati Utomo	
	h. Kelurahan Jati Makmur	
	i. Kelurahan Jati Karya	
30.	Kecamatan Binjai Kota	sda
	a. Kelurahan Berngam	
	b. Kelurahan Satria	
	c. Kelurahan Setia	
	d. Kelurahan Kartini	
	e. Kelurahan Tangsi	
	f. Kelurahan Binjai	
	g. Kelurahan Pekan Binjai	
31.	Kecamatan Binjai Barat	sda
	a. Kelurahan Bandar Senembah	
	b. Kelurahan Limau Mungkur	

	c. Kelurahan Limau Sundai	
	d. Kelurahan Paya Roba	
	e. Kelurahan Suka Maju	
	f. Kelurahan Sukaramai	
32.	Kecamatan Binjai Timur	sda
	a. Kelurahan Tanah Tinggi	
	b. Kelurahan Dataran Tinggi	
	c. Kelurahan Timbang Langkat	
	d. Kelurahan Mencirim	
	e. Kelurahan Tungurono	
	f. Kelurahan Sumber Mulyorejo	
	g. Kelurahan Sumber Karya	
33.	Kecamatan Binjai Selatan	sda
	a. Kelurahan Tanah Merah	
	b. Kelurahan Binjai Estate	
	c. Kelurahan Bhakti Karya	
	d. Kelurahan Rambung Dalam	
	e. Kelurahan Pujidadi	
	f. Kelurahan Tanah Seribu	
	g. Kelurahan Rambung Barat	
	h. Kelurahan Rambung Timur	

Tabel 1. 3

Rincian ASN berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Sekretariat Daerah	17	17	216	250
2.	Sekretariat DPRD	4	7	54	65
3.	Inspektorat Daerah Kota	8	38	18	64
4.	RSUD. DR. RM, Djoelhaam	12	423	108	543
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan	18	6	128	152

	Pendapatan Daerah				
6.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	6	8	28	42
7.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	10	44	61
8.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7	10	29	46
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	4	262	271
10.	Dinas Pendidikan	11	2016	314	2341
11.	Dinas Kesehatan	7	656	110	773
12.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	9	10	73	92
13.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8	5	71	84
14.	Dinas Sosial	7	7	38	52
15.	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan	9	7	106	122
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat	7	10	41	58
17.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	8	15	30
18.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11	19	60	90
19.	Dinas Lingkungan Hidup	9	8	342	359
20.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	6	49	60
21.	Dinas Perhubungan	17	3	221	241
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	6	34	46
23.	Dinas Koperasi, Usaha	6	6	17	29

	Kecil Dan Menengah				
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	13	20	38
25.	Dinas Perpustakaan	5	10	20	35
26.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	9	8	43	60
27.	Dinas Pariwisata	5	4	29	38
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	11	2	198	211
29.	Kecamatan Binjai Utara	45	0	52	97
30.	Kecamatan Binjai Kota	37	0	53	90
31.	Kecamatan Binjai Barat	34	0	34	68
32.	Kecamatan Binjai Timur	38	0	48	86
33.	Kecamatan Binjai Selatan	43	0	58	101
Total		435	3327	2933	6695

#### f. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Binjai (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kota Binjai Tahun 2025 mencapai sebesar **1.077.945.428.948,65** dan Realisasi Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2025 mencapai **1.000.371.755.605,84**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.4  
Laporan Realisasi Anggaran Kota Binjai

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.068.759.825.035,00</b>	<b>1.051.820.767.598,22</b>	<b>98,42</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.221.707.621,00	166.622.818.410,22	92,45
PENDAPATAN TRANSFER	867.518.117.414,00	865.704.369.215,00	99,79
LAIN-LAIN	21.020.000.000,00	19.493.579.973,00	92,74

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.077.945.428.948,65</b>	<b>1.000.371.755.605,84</b>	<b>92,80</b>
BELANJA OPERASI	949.485.403.140,65	899.754.999.917,29	94,76
BELANJA MODAL	127.390.673.634,81	100.416.755.688,55	78,83
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.069.352.173,19	200.000.000,00	18,70

Dari angka di atas dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kota Binjai sudah berusaha merealisasikan pembangunan secara maksimal.

Tabel 1.5

REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA BINJAI TAHUN 2025.

No	Satuan Perangkat Daerah/Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Dinas Pendidikan		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	237.549.621.640,38	166.116.508.489,47
	b. Program Pengelolaan Pendidikan	83.536.516.444,54	32.760.526.652,13
	c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.785.577.663,00	4.490.324.295,00
2.	Dinas Kesehatan		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.210.747.571,80	73.451.025.777,00
	b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.184.961.009,00	49.272.878.496,86
	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	791.053.071,00	647.567.405,00
	d. Program Sediaan	517.233.000,00	433.314.488,00

	Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
	e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	357.299.200,00	40.800.000,00
3.	Dinas PUPR		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.010.043.360,00	6.176.791.008,00
	b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	6.144.788.790,00	5.261091.100,00
	c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.567.513.000,00	8.390.238.130,00
	d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.957.420.006,00	3.879.225.836,00
	e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.993.086.739,00	6.317.635.393,00
	f. Program Penataan Bangunan Gedung	25.689.179.938,00	24.288.012.197,00
	g. Program Penyelenggaraan Jalan	24.354.456.403,00	11.508.599.019,29
	h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	363.724.814,00	83.690.435,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.449.737.843,71	24.025.987.107,00
	b. Program Pengembangan Perumahan	424.388.748,78	248.214.717,00

	c. Program Kawasan Permukiman	126.600.000,00	0,00
	d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	8.139.041.565,00	7.983.087.593,00
	e. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	20.000.000,00	0,00
5.	Dinas Sosial		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.212.766.511,55	4.008.591.973,00
	b. Program Pemberdayaan Sosiak	170.787.699,00	40.800.000,00
	c. Program Rehabilitasi Sosial	140.339.800,26	103.562.969,00
	d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	71.854.727,00	52.721.500,00
	e. Program Penanganan Bencana	401.224.496,00	337.615.464,00
	f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	93.481.697,14	81.675.281,00
6.	SATPOL PP		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.282.965.120,00	5.657.461.302,00
	b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.858.557.184,00	3.951.357.356,00
7.	BPBD		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.973.953.612,00	4.857.951.487,00

	Kabupaten/Kota		
	b. Program Penanggulangan Bencana	9.341.908.499,00	9.241.316.993,00
8.	Disnakerperindag		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.876.729.274,00	5.286.171.238,00
	b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	154.069.810,00	19.778.400,00
	c. Program Penempatan Tenaga Kerja	226.525.846,00	139.292.680,00
	h. Program Hubungan Industrial	311.178.672,00	300.293.400,00
	i. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	189.527.210,00	115.381.600,00
	j. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	69.414.972,00	53.895.600,00
	k. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.589.345.262,00	1.548.103.678,00
	l. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	83.721.128,00	22.048.200,00
	m. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	49.211.672,00	46.978.400,00
	n. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	127.282.600,00	90.609.400,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		

	Perlindungan Anak		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.736.907.490,30	3.462.058.317,00
	b. Program Pengarasutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	28.324.723,00	10.846.199,00
	c. Program Perlindungan Perempuan	391.060.520,00	293.425.477,00
	d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	237.721.917,00	162.942.352,00
	e. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender Anak	9.394.944,00	6.944.944,00
	f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	235.566.903,00	99.010.601,00
	g. Program Perlindungan Khusus Anak	183.779.500,00	131.653.000,00
	h. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.145.826.123,00	1.775.048.525,00
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.770.135.119,99	9.265.135.928,00
	b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.000.000.000,00	0,00
	c. Program Peningkatan	71.126.924,62	26.072.650,00

	Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
	d. Program Pengelolaan Perikanan Budaya	748.484.651,87	709.301.075,00
	e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	130.889.624,10	126.615.760,00
	f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	24.327.003,09	9.063.300,00
	g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	121.233.556,35	51.380.500,00
	h. Program Penyuluhan Pertanian	145.447.404,72	129.200.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.961.401.870,53	8.716.509.133,00
	b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	196.631.939,96	191.307.647,00
	c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	129.911.104,61	120.151.000,00
	d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.937.167.528,65	1.853.638.505,00
	e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	95.548.188,54	95.506.897,00

	Lingkungan Hidup (PPLH)		
	f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	22.158.896,00	17.324.825,00
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.547.054.961,70	4.086.337.956,00
	b. Program Pendaftaran Penduduk	471.377.500,00	462.536.000,00
	c. Program Pencatatan Sipil	27.520.000,00	0,00
	d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.270.000,00	5.025.000,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.063.870.291,74	3.794.059.718,00
	b. Program Pengendalian Penduduk	456.568.893,00	352.187.050,00
	c. Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.600.306.897,00	235.881.585,00
	d. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.251.182.000,00	1.201.819.685,00
14.	Dinas Perhubungan		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	6.695.331.074,10	6.063.239.417,00

	Daerah Kabupaten/Kota		
	b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.000.926.536,00	5.533.550.504,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.918.656.182,15	3.654.239.720,00
	b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.993.630.070,50	2.800.319.315,00
	b. Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.730.122.243,48	2.602.718.572,00
	c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	174.995.240,00	62.128.200,00
	d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	84.180.188,00	62.384.680,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.120.028.741,36	2.984.806.609,00
	b. Program Pelayanan Simpan Pinjam	137.421.364,54	136.707.612,00
	c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	53.047.020,81	34.223.812,00
	d. Program Pemberdayaan	2.184.361.702,00	2.070.895.660,00

	Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
17.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.840.247.894,00	4.529.089.415,00
18.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.199.432.223,30	4.992.441.297,00
	b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	304.745.824,00	267.687.229,00
	c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.028.834.388,00	2.017.027.066,00
	d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00
19.	Dinas Pariwisata		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.247.303.983,05	3.094.733.829,00
	b. Program Pengembangan Kebudayaan	280.254.360,00	270.119.503,00
	c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	214.928.000,00	181.701.738,00
	d. Program Pembinaan Sejarah	33.326.260,00	0,00
	e. Program Pemasaran	237.701.560,00	110.054.200,00

	Pariwisata		
	f. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	166.249.212,000	161.536.189,00
20.	Dinas Perpustakaan		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.025.572.987,60	2.797.661.344,00
	b. Program Pembinaan Perpustakaan	1.032.441.521,00	428.036.401,00
	c. Program Pengelolaan Arsip	152.319.862,00	112.169.160,00
21.	Inspektorat		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.577.582.165,64	11.114.691.139,00
	b. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.291.368.424,00	1.179.280.000,00
	c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	632.387.548,00	376.381.875,00
22.	BKD		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.168.245.187,00	4.979.089.413,09
	b. Program Kepegawaian Daerah	163.793.417,00	118.422.800,00
	c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	748.098.498,00	494.261.375,00
23	BPKAD		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.690.751.866,33	16.067.624.353,00

	Kabupaten/Kota		
	b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.218.771.780,79	2.817.260.874,00
	c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.932.056.662,00	1.310.212.644,00
	d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.608.069.303,80	5.248.040.790,00
24.	Badan Kesbangpol		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.551.699.927,00	4.429.597.158,00
	b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.023.618.664,00	1.015.048.876,00
	c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.599.776.963,00	1.598.073.963,00
	d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	209.711.365,00	195.561.365,00
	e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	99.122.400,00	90.959.400,00
	f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	105.102.770,00	103.302.770,00
26.	Kecamatan Binjai Kota		
	a. Program Penunjang	7.118.619.750,15	6.653.259.045,00

	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	14.817.072,00	14.811.487,00
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.415.025.574,00	1.380.999.600,00
	d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0.00	0.00
27.	Kecamatan Binjai Barat		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.077.727.631,00	6.565.659.488,00
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0.00	0.00
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.208.562.302,00	1.081.052.302,00
	d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39.200.000,00	0.00
28.	Kecamatan Binjai Timur		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.301.590.286,25	7.677.214.399,00
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0,00	0.00
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.668.675.986,00	1.616.350.000,00
	d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	24.625.000,00	20.625.000,00

29.	Kecamatan Binjai Selatan		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.213.584.723,25	7.698.105.430,00
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	0,00	0,00
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.840.418.850,00	1.776.234.525,00
	d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.195.200,00	0,00
29.	Kecamatan Binjai Utara		
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.762.721.956,50	7.103.547.123,00
	b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.000.000,00	14.480.000,00
	c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.998.305.044,00	1.811.169.930,00
	d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0,00	0,00

### 1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### a. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Mengidentifikasi permasalahan pembangunan isu strategis Kota Binjai yang disajikan secara ringkas tanpa menuangkan data berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan

gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### 1. Permasalahan Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Binjai memiliki luas wilayah yang relatif terbatas, yakni sekitar ±90,23 km<sup>2</sup>, yang menjadi salah satu kendala dalam pengembangan wilayah dan ekspansi fungsi-fungsi perkotaan secara optimal. Luas wilayah yang sempit ini menimbulkan tantangan dalam penyediaan ruang untuk pembangunan infrastruktur, permukiman, kawasan industri, dan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Selanjutnya, tingginya kepadatan penduduk yang tersebar di wilayah perkotaan menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menuntut pengelolaan tata ruang yang lebih efisien dan adaptif. Selain itu, letak geografis Kota Binjai yang berbatasan langsung dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal integrasi kawasan, penyelarasan tata ruang, serta pengendalian konversi lahan yang tidak terkoordinasi antar wilayah administratif. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi lainnya yang terus berlangsung tanpa pengendalian yang memadai turut mengancam ketahanan lingkungan serta keseimbangan ekosistem perkotaan.

Dari sisi demografis, pertumbuhan penduduk Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi publik. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan perencanaan kependudukan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Distribusi penduduk antar kecamatan yang tidak merata turut menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Konsentrasi penduduk yang tinggi di beberapa kecamatan tertentu berpotensi menimbulkan kepadatan berlebih, kemacetan, dan penurunan kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, struktur angkatan kerja yang didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan menengah mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses dan mutu pendidikan tinggi serta pelatihan vokasional. Sementara itu, tingginya arus migrasi masuk dari wilayah sekitar, terutama dari kawasan pinggiran Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, turut meningkatkan

beban pelayanan dan infrastruktur dasar serta mempercepat tekanan terhadap keterbatasan ruang dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Binjai.

## 2. Permasalahan Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai menunjukkan berbagai capaian positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya angka kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah-wilayah tertentu. Meskipun secara agregat terjadi penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan antar wilayah masih terjadi, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata dan perlu penanganan berbasis kewilayahan yang lebih spesifik. Selain itu, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih menjadi isu yang mencolok, yang mencerminkan belum optimalnya pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan ini dapat memicu eksklusi sosial dan memperlemah kohesi sosial di tingkat lokal. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal juga menjadi indikator lemahnya struktur ekonomi lokal, mengingat sektor ini umumnya tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai dan memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah. Keadaan ini berimplikasi pada tingkat kesejahteraan yang tidak stabil serta rentan terhadap guncangan ekonomi.

Tingkat pengangguran terbuka yang masih fluktuatif turut menjadi tantangan dalam pencapaian kesejahteraan. Terutama di kalangan usia produktif dan lulusan muda, tingginya angka pengangguran menunjukkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja lokal. Hal ini menjadi pertanda perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan industri. Pada saat yang sama, kualitas dan cakupan layanan pendidikan juga menghadapi kendala, termasuk keterbatasan tenaga pendidik berkualitas dan infrastruktur pendidikan yang belum merata, khususnya di daerah padat dan pinggiran kota.

Dalam sektor kesehatan, beberapa indikator menunjukkan capaian yang belum optimal. Prevalensi stunting, cakupan imunisasi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar masih memerlukan

peningkatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Tantangan ini diperparah oleh belum optimalnya jangkauan program perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin. Masih terbatasnya intervensi yang bersifat berkelanjutan dan menyeluruh menyebabkan kelompok ini berisiko tertinggal dari arus utama pembangunan. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai perlu diarahkan pada penguatan inklusivitas pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta penguatan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin. Pendekatan lintas sektor dan berbasis data spasial menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

### 3. Permasalahan Kondisi Daya Saing

Daya saing daerah merupakan elemen krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Binjai, sebagai bagian dari wilayah strategis di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi daya saing yang cukup baik. Namun demikian, terdapat berbagai permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam optimalisasi potensi tersebut. Salah satu isu utama adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tergolong baik, namun tantangan dalam penyelarasan kompetensi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri masih cukup signifikan.

Selain itu, tingkat produktivitas tenaga kerja masih terbatas akibat dominasi sektor informal dan rendahnya adopsi teknologi dalam proses produksi. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasional dan minimnya investasi pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Keterbatasan ini menghambat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta memperlambat proses transformasi ekonomi daerah. Di sisi lain, meskipun iklim usaha di Kota Binjai menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat tantangan dalam hal kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur dasar, terutama di kawasan industri dan perdagangan.

Infrastruktur penunjang daya saing seperti jalan, transportasi publik, dan sistem logistik masih perlu ditingkatkan kualitas dan

keterpaduannya. Konektivitas intra dan antar wilayah belum sepenuhnya mendukung mobilitas barang dan jasa secara efisien, yang pada akhirnya berdampak terhadap efisiensi biaya produksi dan distribusi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik dan sektor usaha juga belum optimal, meskipun indeks masyarakat digital menunjukkan peningkatan. Penguatan digitalisasi di sektor pemerintahan dan pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur jaringan, literasi digital, dan keterjangkauan perangkat teknologi.

Dari sisi kelembagaan dan inovasi, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi masih belum terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat inovasi daerah serta keterbatasan dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, untuk memperkuat daya saing Kota Binjai ke depan, diperlukan intervensi strategis yang mencakup penguatan kualitas SDM, percepatan digitalisasi, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi perizinan, serta pengembangan ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif. Upaya-upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, guna menjadikan Kota Binjai sebagai kota yang kompetitif, produktif, dan berkelanjutan.

#### 4. Permasalahan Kondisi Pelayanan Umum

Meskipun Kota Binjai menunjukkan sejumlah kemajuan dalam peningkatan kualitas layanan publik, berbagai permasalahan masih mewarnai aspek layanan umum yang memerlukan perhatian dan penanganan serius secara terpadu. Salah satu permasalahan utama yang masih terjadi adalah stagnasi dalam penegakan peraturan daerah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, persentase penegakan perda belum mengalami peningkatan signifikan, tetap berada di kisaran 57%, yang mencerminkan lemahnya efektivitas pelaksanaan regulasi, kurangnya pengawasan yang konsisten, serta belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum di tingkat lokal.

Selain itu, capaian opini keuangan Pemerintah Kota Binjai yang sempat menurun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2022 menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Ketidakkonsistenan ini

mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan daerah masih memerlukan penguatan dari sisi akuntabilitas dan transparansi agar keberlanjutan opini WTP dapat dijaga pada tahun-tahun berikutnya. Dalam aspek reformasi birokrasi, meskipun terjadi peningkatan kategori dari “C” menjadi “B”, hal ini menandakan masih adanya ruang perbaikan dalam hal efisiensi kelembagaan, penyederhanaan prosedur layanan, serta penerapan sistem merit yang konsisten. Manajemen kinerja berbasis indikator dan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di seluruh perangkat daerah.

Di sisi lain, meskipun nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tantangan masih ditemukan dalam hal integrasi sistem antar unit kerja, literasi digital aparatur, dan infrastruktur TIK yang belum merata. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penerapan digitalisasi layanan publik yang andal dan aman di seluruh sektor pelayanan. Lebih lanjut, inovasi layanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat masih terbatas, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik memang mencerminkan perbaikan kualitas, namun belum sepenuhnya disertai oleh terobosan inovatif yang bersifat sistemik dan dapat memperluas akses, efisiensi, serta kepuasan layanan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan pada aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, serta inovasi layanan agar kinerja pelayanan umum Kota Binjai dapat semakin adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

Berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dari masing-masing aspek pembangunan, mulai dari aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, hingga kualitas pelayanan umum, mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Kota Binjai dalam menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berdampak secara sektoral, namun juga saling terkait dan berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan isu-isu strategis pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor dan mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat secara

komprehensif. Isu-isu pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2025– 2029 menjadi fondasi utama untuk merancang arah kebijakan, strategi, serta program prioritas daerah yang berbasis pada kondisi riil, tantangan aktual, serta potensi unggulan yang dimiliki Kota Binjai demi mewujudkan visi daerah menuju kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

### **1. Keterbatasan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan**

Permasalahan keterbatasan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kota Binjai merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum merata, keterbatasan tenaga kesehatan, serta kualitas layanan yang masih beragam menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tepat waktu. Kondisi ini berpotensi memperlemah ketahanan kesehatan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko penyakit menular dan tidak menular yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan sistem layanan kesehatan perlu menjadi prioritas untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan.

### **2. Tingginya Angka Stunting dan Kesehatan Masyarakat yang belum Inklusif**

Angka stunting yang masih tergolong tinggi mencerminkan permasalahan gizi kronis yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kelompok rentan seperti balita, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai. Ketidakterjangkauan layanan kesehatan yang inklusif berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan memperdalam kemiskinan struktural. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting dan perluasan akses layanan kesehatan yang inklusif perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan daerah.

### **3. Pendidikan dan Pengembangan SDM yang Terbatas**

Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sebagian besar angkatan kerja belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sedangkan akses terhadap pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional masih terbatas. Permasalahan ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan

usia produktif. Oleh karena itu, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan kerja perlu diprioritaskan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

#### **4. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata**

Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur antarwilayah di Kota Binjai masih menjadi kendala dalam pemerataan hasil pembangunan. Beberapa wilayah belum memperoleh akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, dan jaringan listrik. Ketidakmerataan ini menghambat konektivitas wilayah, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan perlu ditempatkan sebagai prioritas guna mendukung pertumbuhan wilayah secara inklusif dan berkelanjutan.

#### **5. Pengelolaan Ekonomi dan Pengurangan Ketimpangan**

Struktur ekonomi Kota Binjai yang masih didominasi oleh sektor informal serta belum optimalnya kontribusi sektor produktif menyebabkan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan publik, dan kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta perluasan kesempatan kerja untuk menurunkan ketimpangan sosial-ekonomi secara sistemik.

#### **6. Ketahanan Pangan dan Penyediaan Infrastruktur yang belum Merata**

Ketahanan pangan menjadi isu penting meskipun Kota Binjai bukan wilayah agraris utama. Akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, infrastruktur pendukung sistem pangan seperti pasar rakyat, sistem distribusi logistik, dan fasilitas penyimpanan pangan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan dan pemerataan infrastruktur pendukungnya menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **7. Tantangan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Peningkatan aktivitas perkotaan dan pertumbuhan penduduk yang cepat memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup, termasuk

berkurangnya ruang terbuka hijau, peningkatan volume sampah, serta risiko banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan. Permasalahan ini, apabila tidak ditangani dengan baik, akan mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan kota. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan lingkungan dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Kota Binjai.

## **b. VISI MISI KEPALA DAERAH**

### **1. Visi**

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah- langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

**“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”**

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai- nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat

tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik

membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**”, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

**Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.**

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, **sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 1 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1 pada RPJPD Binjai.**

**Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.**

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi, sejalan dengan Asta Cita 2, 4, 5 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 dan 5 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1, 2 dan 5 pada RPJPD Binjai.

**Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.**

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 4 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 6 dan 7 pada RPJPD Binjai.

**Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.**

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 3 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai.

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai. Dalam penyusunannya, misi RPJMD Kota Binjai ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam misi RPJPD Kota Binjai, RPJMD Sumatera Utara, serta RPJMN. Proses penyusunan misi ini mengacu pada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan daerah dengan strategi pembangunan nasional dan provinsi, guna memastikan keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD Kota Binjai 2024-2029 bertujuan untuk tidak hanya mendukung pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat provinsi dan nasional.

### **c. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diimplementasikan dalam perencanaan operasional. Dalam penyusunan RPJMD saat ini, keselarasan antara visi dan misi daerah dengan sasaran utama serta arah kebijakan dielaborasi melalui visi dan misi kepala daerah, beserta strategi serta arah kebijakan yang ditetapkan.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Binjai adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas pembangunan yang ditetapkan

oleh kepala daerah.

Untuk mempercepat dampak pembangunan, dirumuskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai *quick wins* pembangunan yang merupakan program- program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus merepresentasikan implementasi dari kelima misi pembangunan. Setiap program prioritas didesain untuk memberikan dampak jangka pendek dan menengah yang terukur, sebagai fondasi menuju transformasi jangka panjang. Dengan kata lain, PHTC menjadi pengungkit awal yang mendekatkan Kota Binjai pada kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan dalam visi dan misi RPJMD.

Berikut adalah 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/*Quick Wins*) beserta tujuan, dampak yang diharapkan dan ruang lingkup yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029:

**1. Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Didik TK, SD, dan SMP Serta Pemberian Edukasi Gizi Bagi Guru dan Orang Tua**

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak usia sekolah di Kota Binjai memperoleh asupan makanan bergizi yang cukup serta pendidikan gizi yang tepat sejak dini. Tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat di lingkungan sekolah, program ini juga menekankan pentingnya edukasi gizi kepada guru dan orang tua sebagai aktor utama yang berperan dalam membentuk kebiasaan makan anak. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tumbuh kembang optimal anak secara fisik dan kognitif.

Program ini selaras dengan kebijakan nasional seperti Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Intervensi Gizi Terintegrasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Upaya ini juga sejalan dengan arahan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), yang menempatkan satuan pendidikan sebagai tempat strategis untuk intervensi gizi secara berkelanjutan. Melalui edukasi yang menysasar lingkungan rumah dan sekolah secara bersamaan, program ini memperkuat ekosistem gizi anak secara holistik.

Manfaat langsung dari program ini adalah menurunnya prevalensi gizi buruk di kalangan anak usia sekolah, meningkatnya konsentrasi dan prestasi belajar siswa, serta terbentuknya kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan. Dengan melibatkan guru dan orang tua sebagai mitra aktif, program ini tidak hanya menjadi intervensi kesehatan, tetapi juga investasi sosial dalam menciptakan generasi muda Kota Binjai yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

## **2. Peningkatan Kualitas Layanan Akses Kesehatan (Stunting, UHC, Pengobatan Gratis) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis**

Program peningkatan kualitas layanan akses kesehatan di Kota Binjai menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Pemerintah Kota Binjai secara konsisten berkomitmen untuk memperluas cakupan dan mutu layanan kesehatan melalui berbagai upaya yang terintegrasi, seperti penurunan angka stunting, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), penyediaan pengobatan gratis, serta penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala. Strategi ini dirancang untuk menjamin akses yang merata terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Dalam rangka menurunkan angka stunting, Pemko Binjai melaksanakan program intervensi gizi terpadu mulai dari masa kehamilan hingga usia balita, termasuk pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi pola asuh, dan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin di posyandu. Pendekatan multisektor juga dilibatkan, dengan dukungan dari sektor pendidikan, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga, untuk memastikan faktor-faktor penyebab stunting ditangani secara menyeluruh. Pelibatan aktif kader kesehatan di tingkat kelurahan dan desa menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan program ini. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Binjai menunjukkan komitmen daerah dalam menjamin seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial. Dengan mengintegrasikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, pemerintah daerah menanggung iuran bagi warga

kurang mampu, serta memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan. Ini menjadi langkah konkret dalam menjamin hak kesehatan warga sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, program pengobatan gratis yang dijalankan melalui fasilitas kesehatan pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit daerah, sangat membantu meringankan beban masyarakat. Mekanisme pelayanan dibuat sederhana dan transparan, dengan pelayanan yang mencakup pengobatan penyakit umum, pengelolaan penyakit kronis, hingga layanan farmasi dasar. Upaya ini bukan hanya meningkatkan akses, tetapi juga mendorong masyarakat lebih proaktif dalam menjaga kesehatannya sejak dini.

Pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala, baik melalui puskesmas keliling, kegiatan bakti sosial, maupun layanan terpadu di kelurahan, merupakan bentuk pendekatan promotif dan preventif yang sangat penting. Pemerintah Kota Binjai berupaya menjadikan layanan ini sebagai program berkelanjutan dengan dukungan anggaran daerah dan kolaborasi lintas sektor. Melalui strategi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit dapat meningkat, sehingga kualitas hidup warga Kota Binjai dapat terus terjaga dalam jangka panjang.

### **3. Meningkatkan Mutu Pendidikan Formal dan Non-Formal Dengan Menyediakan Fasilitas dan Guru yang Berkualitas**

Program peningkatan mutu pendidikan formal dan non-formal di Kota Binjai merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyadari bahwa pendidikan yang bermutu menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis telah dirancang dan diimplementasikan, baik pada jenjang pendidikan formal seperti sekolah dasar hingga menengah, maupun pada pendidikan non-formal seperti kursus, pelatihan keterampilan, dan pendidikan kesetaraan. Fokus utamanya adalah pemerataan akses, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan. Pemerintah Kota Binjai secara

bertahap melakukan pembangunan dan renovasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi yang layak dan ramah anak. Selain itu, pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi juga mulai diperluas guna mendukung transformasi digital di lingkungan sekolah. Di sisi pendidikan non-formal, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan lembaga pelatihan diberikan bantuan sarana penunjang agar mampu memberikan layanan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Aspek peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama dalam mendukung keberhasilan program ini. Pemerintah daerah secara aktif mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pendidik, baik melalui program pelatihan berkelanjutan, workshop, maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi. Selain itu, insentif dan penghargaan bagi guru berprestasi diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme. Di sektor non-formal, fasilitator dan tutor juga dilibatkan dalam pelatihan yang relevan agar dapat mendampingi peserta didik secara optimal.

Keberlanjutan program ini dijaga melalui integrasi perencanaan pendidikan dengan kebijakan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Pemerintah Kota Binjai menetapkan anggaran pendidikan secara proporsional dan berkomitmen menjaga kesinambungan program melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Pemanfaatan data dan evaluasi berkala juga dilakukan guna memastikan setiap program pendidikan tepat sasaran dan berdampak positif bagi peningkatan mutu pembelajaran.

Dengan strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan ini, diharapkan Kota Binjai mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkualitas, baik di jalur formal maupun non-formal. Masyarakat akan mendapatkan kesempatan belajar sepanjang hayat, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah secara umum. Upaya ini tidak hanya menyiapkan generasi muda yang cakap secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan

hidup yang relevan dengan tantangan zaman.

#### **4. Melanjutkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis UMKM Dengan Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah, dan Memberikan Bantuan Sosial Bagi Keluarga yang Kemalangan**

Program pemberdayaan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Binjai merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi perekonomian lokal yang inklusif dan berdaya tahan. Melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah, pemerintah berupaya mendorong transformasi UMKM agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Komite ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan inkubasi ide-ide kreatif yang lahir dari pelaku usaha lokal, dengan fokus pada subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen, kerajinan, dan digitalisasi produk.

Upaya penguatan UMKM juga dilakukan melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan dan pasar. Pemerintah Kota Binjai aktif menjalin kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, dan platform digital untuk membantu pelaku UMKM memperoleh permodalan dan memperluas jaringan pemasaran. Selain itu, penyelenggaraan bazar UMKM, pameran produk lokal, serta promosi berbasis media sosial turut digencarkan sebagai sarana memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah kepada masyarakat luas, termasuk pembeli dari luar kota.

Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam merumuskan kebijakan, mengidentifikasi potensi unggulan daerah, serta menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan pemerintah. Komite ini diisi oleh perwakilan dari akademisi, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan birokrat yang berpengalaman, sehingga keputusan dan arah program yang diambil dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberadaan komite ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Kota Binjai juga tetap menjaga aspek keadilan sosial dengan memberikan bantuan sosial

bagi keluarga yang mengalami kemalangan, seperti kehilangan anggota keluarga, bencana, atau kesulitan ekonomi mendesak. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, paket kebutuhan pokok, atau layanan kesehatan dan psikososial, serta didistribusikan secara cepat dan transparan melalui mekanisme berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Program ini menjadi bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi. Keberlanjutan program ini dijamin melalui integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah juga melibatkan peran aktif masyarakat, swasta, dan lembaga sosial untuk mendukung pendanaan serta pengawasan pelaksanaan program. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang kuat, Kota Binjai diharapkan mampu menjadi daerah yang tangguh secara ekonomi, kreatif dalam inovasi, dan humanis dalam menghadapi krisis sosial masyarakatnya.

#### **5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Drainase yang Mendukung Konektivitas dan Estetika Kota**

Program peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan drainase di Kota Binjai merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah daerah dalam mendorong konektivitas wilayah, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperkuat estetika dan daya tarik kota. Jalan dan sistem drainase yang baik bukan hanya menunjang kelancaran transportasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Binjai secara bertahap melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan saluran air dengan perencanaan yang matang dan berorientasi pada keberlanjutan.

Strategi utama yang diterapkan mencakup identifikasi prioritas ruas jalan yang rusak, padat lalu lintas, atau rawan genangan air, serta penyesuaian desain infrastruktur dengan kondisi geografis dan pertumbuhan kawasan. Untuk sistem drainase, pemerintah fokus pada perbaikan saluran yang tersumbat, normalisasi aliran air, dan pembangunan drainase baru di kawasan rawan banjir. Teknologi ramah lingkungan seperti drainase berwawasan ekologis

(eco-drain) mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kapasitas resapan air dan mengurangi beban pada sistem saluran kota.

Upaya peningkatan kualitas jalan juga diikuti dengan penerapan standar teknis pembangunan yang memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan pengguna, dan estetika visual. Trotoar bagi pejalan kaki diperbaiki, lampu jalan ditingkatkan, dan marka jalan diperjelas guna menciptakan lingkungan kota yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, penghijauan dan penataan taman di sepanjang jalur utama kota juga menjadi bagian integral dari program ini untuk memperindah wajah kota dan meningkatkan kualitas udara.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi antar perangkat daerah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta partisipasi aktif sektor swasta dalam pendanaan dan pelaksanaan. Pemerintah Kota Binjai juga memanfaatkan sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi pemantauan digital untuk memetakan kondisi infrastruktur secara real-time dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah. Transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan turut mendukung akuntabilitas program.

Untuk menjaga keberlanjutannya, program peningkatan infrastruktur jalan dan drainase telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen teknis perencanaan lainnya. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan, serta terus mengevaluasi kualitas pelaksanaan dan dampak dari proyek yang berjalan. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas antarwilayah, tetapi juga menciptakan lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan layak huni bagi seluruh warga Kota Binjai.

## **6. Membangun Tata Kelola yang Inovatif dan Kreatif Melalui Pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Penguatan Smart City**

Program membangun tata kelola yang inovatif dan kreatif melalui pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) dan penguatan Smart City merupakan langkah progresif Pemerintah Kota Binjai dalam

mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses birokrasi, dan menghadirkan kenyamanan dalam akses layanan oleh warga kota. Pendirian MPP menjadi simbol transformasi pelayanan menjadi lebih terpusat, mudah dijangkau, dan berbasis teknologi digital yang terintegrasi.

Strategi utama yang diterapkan adalah menggabungkan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu lokasi terpadu, yakni MPP, sehingga masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan daerah, layanan BPJS, dan kebutuhan lainnya secara cepat dan efisien. Pemerintah Kota Binjai bekerja sama dengan instansi vertikal, BUMN, dan lembaga non-pemerintah untuk menghadirkan berbagai jenis layanan dalam satu atap, yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan kepuasan publik terhadap birokrasi pemerintah.

Penguatan konsep Smart City dijalankan secara paralel dengan pendekatan berbasis data dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan pelayanan yang lebih responsif. Sistem informasi kota, aplikasi layanan digital, command center, serta pemanfaatan CCTV dan IoT (Internet of Things) diterapkan untuk mendukung sektor-sektor penting seperti transportasi, keamanan, kebersihan, dan pengelolaan bencana. Pelibatan masyarakat juga diperkuat melalui platform aduan publik, survei kepuasan layanan digital, dan media sosial resmi pemerintah sebagai saluran komunikasi dua arah yang terbuka.

Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan di bidang teknologi, manajemen pelayanan publik, dan inovasi kebijakan. Pemerintah Kota Binjai juga mendorong budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Penghargaan terhadap unit kerja atau pegawai yang menghadirkan inovasi pelayanan publik turut diberikan untuk membangun semangat inovatif secara berkelanjutan di lingkungan birokrasi.

Keberlanjutan program ini dijaga melalui integrasi tata kelola MPP

dan Smart City ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan panjang. Pemerintah Kota Binjai berkomitmen mengalokasikan anggaran secara proporsional serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi dan inovasi pelayanan. Dengan pendekatan ini, Kota Binjai diharapkan menjadi kota modern yang tidak hanya efisien dalam pelayanan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan inovasi yang berkelanjutan.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) diharapkan mampu dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Kota Binjai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pertama yang disusun selaras dan terintegrasi dengan Program Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Binjai periode 2025-2029. Adapun penjabaran 16 (enam belas) Program Prioritas RPJMD Kota Binjai 2025-2029 adalah sebagai berikut.

#### **1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter**

Program prioritas "Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkarakter" bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia melalui berbagai strategi yang mencakup peningkatan akses pendidikan, kesejahteraan guru, pengembangan kurikulum, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, serta penguatan pendidikan karakter. Dalam upaya ini, pemerintah menargetkan adanya peningkatan dalam berbagai indikator kinerja pendidikan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemampuan literasi, numerasi, rata-rata lama sekolah, serta harapan lama sekolah, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang lebih baik dan inklusif.

Peningkatan akses pendidikan dasar melalui program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP menjadi langkah utama dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati pendidikan yang layak. Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi perhatian penting, dengan

harapan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan mendukung keberhasilan pendidikan. Pengembangan kurikulum yang menekankan pada peningkatan literasi dan numerasi siswa, termasuk bagi mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti masyarakat miskin, serta penyandang disabilitas, diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan masyarakat miskin, rentan, dan disabilitas menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya ini untuk memberikan dukungan lebih kepada mereka yang memiliki potensi namun terbatas oleh faktor ekonomi dan sosial. Selain itu, penguatan pendidikan karakter menjadi prioritas untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam kehidupan sosial.

Target-target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan jangka panjang untuk memajukan pendidikan dasar yang inklusif dan berkarakter. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

## **2. Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan melalui jaminan sosial inklusif, dukungan pekerjaan, dan penanganan kekerasan**

Program prioritas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok rentan melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada jaminan sosial. Fokus utama dari program ini adalah untuk memastikan akses yang lebih besar bagi Lansia, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas terhadap layanan sosial dan pekerjaan yang layak, serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu strategi utama yang diusung adalah jaminan sosial inklusif, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok tersebut.

Melalui strategi perlindungan pekerja informal, pemerintah berusaha memberikan dukungan dalam hal perlindungan

ketenagakerjaan dan akses ke layanan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengembangan usaha rumah tangga produktif juga merupakan bagian dari program ini, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat di level rumah tangga guna meningkatkan pendapatan keluarga. Langkah selanjutnya adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung kesejahteraan keluarga.

Dukungan lebih lanjut diberikan melalui peningkatan kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor formal, yang menjadi salah satu indikator kinerja utama program ini. Terakhir, pemulihan psikologis dan kesehatan mental bagi korban kekerasan keluarga menjadi prioritas penting, dengan tujuan untuk memberikan dampak jangka panjang dalam kesejahteraan mental masyarakat. Melalui program ini, diharapkan kelompok rentan memperoleh perlindungan sosial yang lebih inklusif dan dukungan yang lebih besar dalam mengakses berbagai layanan sosial dan pekerjaan yang layak.

### **3. Peningkatan layanan kesehatan terpadu melalui infrastruktur, tenaga kesehatan, pencegahan penyakit, dan gerakan hidup sehat**

Program prioritas "Peningkatan layanan kesehatan terpadu melalui infrastruktur, tenaga kesehatan, pencegahan penyakit, dan gerakan hidup sehat" merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai pendekatan yang komprehensif. Program ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan mutu layanan kesehatan (PIMULKES), yang akan memastikan fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan pelayanan yang lebih efektif. Selain itu, gerakan sinergi lintas lembaga dan masyarakat (GESIT LINMAS) menjadi bagian dari usaha untuk membangun kolaborasi antar sektor dalam menghadapi tantangan kesehatan yang ada.

Dalam hal pencegahan penyakit, fokus utama adalah pada pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dengan penekanan pada deteksi dini dan pemenuhan ketepatan serta kompetensi tenaga kesehatan. Peningkatan kualitas tenaga medis,

melalui program pelatihan dan pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan, akan sangat mendukung efektivitas pelayanan kesehatan. Indikator pencapaian yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2029, seperti peningkatan angka harapan hidup dan cakupan jaminan kesehatan nasional, menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program ini. Keberhasilan ini juga tercermin dari pengurangan prevalensi stunting, peningkatan cakupan pengobatan dan penemuan penyakit menular, serta angka keberhasilan pengobatan tuberculosis. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif dengan dukungan sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

#### **4. Penguatan ekonomi daerah melalui investasi, penyerapan tenaga kerja, efisiensi anggaran, dan optimalisasi penerimaan daerah**

Program prioritas "Penguatan Ekonomi Daerah melalui Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, Efisiensi Anggaran, dan Optimalisasi Penerimaan Daerah" bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui serangkaian langkah strategis yang komprehensif dan terarah. Salah satu pendekatan utama dalam program ini adalah pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal asing dan domestik yang bertujuan menarik investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu strategi kunci, di mana BUMD diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan serta peningkatan penerimaan daerah. Selain itu, untuk mengatasi tantangan pengangguran, strategi perekrutan tenaga kerja melalui penyelenggaraan job fair dan kerja sama dengan dunia usaha menjadi hal yang krusial. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan formal. Program ini juga menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja operasional dan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan yang lebih efektif. Pengelolaan anggaran yang efisien diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang lebih optimal dan tepat sasaran. Tidak

kalah penting, optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi strategi vital untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas program ini meliputi persentase peningkatan investasi, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, serta rasio pajak daerah terhadap PDRB. Dengan pelaksanaan yang tepat dan terukur, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam penguatan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**5. Pembentukan kota berkelanjutan melalui infrastruktur hijau, pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, dan transisi energi bersih**

Program prioritas yang diusung oleh Pemerintah Kota Binjai, yaitu "Pembentukan Kota Berkelanjutan melalui Infrastruktur Hijau, Pengelolaan Sampah, Rehabilitasi Lingkungan, dan Transisi Energi Bersih", bertujuan untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pencapaian tujuan ini dijabarkan dalam empat program strategis yang memiliki fokus utama pada pengembangan infrastruktur hijau perkotaan, pengelolaan sampah yang terorganisir, rehabilitasi lingkungan, serta implementasi transisi energi bersih.

Program pertama, yakni pengembangan infrastruktur hijau perkotaan, berfokus pada pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai area resapan air, tetapi juga sebagai sarana mitigasi perubahan iklim di kawasan perkotaan. Sementara itu, program kedua berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah perkotaan melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), yang dirancang untuk mengelola sampah secara efisien dan terintegrasi, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

Program ketiga berkaitan dengan penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami kerusakan, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan memperkuat daya dukung ekosistem. Terakhir, kampanye pemanfaatan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi

bersih diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat proses pengurangan emisi gas rumah kaca.

Indikator kinerja dari program ini mencakup peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, konsumsi listrik per kapita yang lebih efisien, serta peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer. Dengan target-target yang telah ditetapkan hingga tahun 2029, diharapkan program-program tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai.

#### **6. Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga**

Program prioritas "Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga" bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup serta mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, tiga program strategis telah dirumuskan, yaitu (1) Kerjasama Antar Daerah untuk Ketersediaan Pangan, yang bertujuan memperkuat kerjasama antara daerah guna memastikan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, (2) Pengendalian Inflasi Harga Bahan Pokok, yang bertujuan menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, dan (3) Pasar Murah Bergerak, yang menyediakan akses pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam upaya pencapaian program ini, sejumlah indikator kinerja telah ditetapkan sebagai acuan. Indeks Ketahanan Pangan yang mencerminkan upaya peningkatan ketersediaan dan akses pangan secara keseluruhan. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan harga pangan antar wilayah. Sedangkan tingkat inflasi diharapkan dapat tetap terjaga guna menjaga stabilitas harga yang dapat mendukung daya beli masyarakat. Dengan berbagai program strategis dan indikator kinerja yang jelas, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga dapat tercapai untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **7. Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui dukungan destinasi, serta promosi seni dan budaya lokal**

Program prioritas "Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui dukungan destinasi, serta promosi seni dan budaya lokal" berfokus pada pemajuan sektor pariwisata Kota Binjai dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi pariwisata, pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan kualitas dan kuantitas objek wisata yang ada, sambil memperkenalkan konsep wisata yang mengedepankan pelestarian alam dan budaya lokal. Seiring dengan itu, upaya pengembangan pekerja pariwisata juga menjadi bagian integral dari program ini guna memastikan bahwa tenaga kerja di sektor pariwisata memiliki keterampilan yang memadai dan siap bersaing dalam industri global.

Kegiatan seperti Pekan Seni dan Budaya Kota Binjai menjadi platform penting untuk mengenalkan dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal yang kaya kepada masyarakat luas, sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan. Revitalisasi dan pelestarian situs-situs budaya juga akan mendapatkan perhatian besar, dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas kota, serta memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Selain itu, pembangunan kawasan Waterfront City Sungai Bingai yang mendukung pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan destinasi wisata baru yang berpotensi menjadi ikon pariwisata di kawasan ini.

Dengan target kinerja yang terukur, seperti peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, rasio PDRB sektor pariwisata, dan indeks pembangunan kebudayaan, program ini bertujuan untuk mengangkat sektor pariwisata Kota Binjai menjadi lebih berkembang, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

#### **8. Penguatan Koperasi dan UMKM melalui pendampingan terpadu, dan berbasis digital**

Program prioritas "Penguatan Koperasi dan UMKM melalui pendampingan terpadu, dan berbasis digital" bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian, terutama di Kota Binjai. Program ini mencakup tiga strategi utama yang saling mendukung,

yakni revitalisasi koperasi dan UMKM dengan pendekatan yang mencakup pendampingan, inovasi, networking, teknologi, serta peningkatan akses dan ketahanan. Selain itu, pengembangan UMKM melalui platform digital (UMKM Go Digital) juga diutamakan, agar para pelaku usaha dapat mengakses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing. Tak kalah penting, program ini juga fokus pada pengembangan pasar UMKM dan pertunjukkan seni budaya yang diharapkan dapat meningkatkan visibility serta menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari pelaksanaan program, ditetapkan berbagai indikator kinerja yang memiliki target yang jelas. Misalnya, kontribusi UMKM terhadap PDRB, serta peningkatan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB. Tidak hanya itu, penguatan sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian dengan target jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual (HAKI). Untuk mendukung pencapaian tersebut, program ini juga memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata. Implementasi strategi ini diharapkan mampu mengakselerasi perkembangan sektor UMKM di Kota Binjai, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan.

**9. Pemberantasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat**

Program prioritas "Pemberantasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat" yang diusung oleh Pemerintah Kota Binjai merupakan langkah strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah melalui pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi. Dalam upaya ini, terdapat dua program strategis utama, yaitu sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia usaha (Sivoso) serta peningkatan keterampilan wirausaha mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor wirausaha yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Indikator kinerja utama yang menjadi acuan dalam pengukuran pencapaian program ini meliputi peningkatan produktivitas pekerja terhadap PDRB, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi, serta persentase lulusan pendidikan

tinggi yang bekerja di bidang keahlian mereka. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan kewirausahaan daerah, yang diharapkan dapat menciptakan peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran terbuka serta tingkat kemiskinan yang ada.

Sebagai bagian dari target jangka menengah, program ini menetapkan peningkatan signifikan pada indikator-indikator tersebut serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui peningkatan keterampilan dan penyediaan peluang wirausaha yang lebih luas. Melalui implementasi program ini, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kota Binjai.

#### **10. Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN**

Program prioritas "Tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN" bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan publik melalui peningkatan integritas, profesionalisme, serta kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis yang mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi ASN, kolaborasi antar lembaga dalam penegakan hukum, serta upaya untuk memastikan ASN bebas dari narkoba dan judi online. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang melibatkan manajemen talenta dan perekrutan P3K tanpa pungli, serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, indikator kinerja yang telah ditetapkan mencakup peningkatan indeks profesionalisme ASN, persentase penegakan hukum peraturan daerah, serta indeks reformasi birokrasi. Target kinerja yang ditetapkan menunjukkan upaya yang terukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Adapun sasaran pada tahun 2029 diharapkan dapat tercapai dengan peningkatan indeks profesionalisme ASN, persentase penegakan

hukum, dan indeks reformasi birokrasi. Pencapaian ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

#### **11. Transformasi digital kota melalui layanan publik berbasis internet, dan smart city**

Program prioritas "Transformasi digital kota melalui layanan publik berbasis internet, dan smart city" bertujuan untuk memajukan Kota Binjai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat aspek pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Dalam mencapai tujuan tersebut, program ini menitikberatkan pada tiga strategi utama, yakni penyediaan layanan Wi-Fi gratis di ruang publik, penguatan sistem data terintegrasi kota Binjai melalui inisiatif Binjai Satu Data, serta pengembangan platform e-government.

Penyediaan layanan Wi-Fi gratis di ruang publik merupakan langkah strategis untuk memastikan akses informasi yang lebih merata bagi masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Selanjutnya, penguatan sistem data terintegrasi melalui Binjai Satu Data diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah serta memberikan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, pengembangan platform e-government bertujuan untuk mempermudah proses administrasi pemerintah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung transparansi dalam pelaporan kegiatan pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan program ini, sejumlah indikator kinerja telah ditetapkan, seperti persentase area publik yang memanfaatkan akses internet, indeks masyarakat digital Indonesia, dan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2029 menunjukkan ambisi besar dalam mencapai transformasi digital yang merata dan efektif, dengan indikator-indikator yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan langkah-langkah tersebut,

diharapkan Kota Binjai dapat menjadi kota yang lebih cerdas, terhubung, dan siap menghadapi tantangan di era digital.

**12. Pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan yang mendukung konektivitas, dan inklusif**

Program prioritas "Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan yang Mendukung Konektivitas dan Inklusif" bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di kota-kota, dengan fokus pada keberlanjutan, konektivitas, dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek, antara lain konektivitas infrastruktur jalan perkotaan yang lebih baik, pengendalian banjir yang adaptif terhadap curah hujan ekstrem, peningkatan akses sanitasi aman, serta penyediaan transportasi ramah lingkungan. Selain itu, program ini juga mencakup perluasan jaringan distribusi air bersih, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Dalam upaya mencapai tujuan ini, pemerintah menargetkan sejumlah indikator kinerja yang jelas, seperti rasio konektivitas, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, serta jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum bersih. Selain itu, terdapat pula target dalam hal penurunan risiko bencana, peningkatan kualitas layanan infrastruktur, serta ketersediaan hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan. Melalui program ini, diharapkan dapat terwujud kota-kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

**13. Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan ekspor, akses pembiayaan, dan dukungan perluasan pasar**

Program prioritas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor UMKM melalui tiga pilar utama, yakni pelatihan ekspor, akses pembiayaan, dan dukungan perluasan pasar. Sebagai langkah strategis, program ini mengedepankan pelatihan ekspor yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menjangkau pasar internasional, membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Selain itu, fasilitasi akses pembiayaan menjadi faktor kunci untuk

memastikan kelangsungan dan pengembangan usaha, dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi UMKM untuk memperluas kapasitas produksi serta meningkatkan kualitas produk. Terakhir, perbaikan tata kelola pasar juga menjadi prioritas, yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang nyaman, bersih, dan sehat, guna mendukung keberlanjutan usaha serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi UMKM terhadap PDRB, meningkatkan angka kewirausahaan daerah, dan memperluas sektor ekonomi kreatif. Target-target yang telah ditetapkan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM, dengan proporsi PDRB ekonomi kreatif, sementara rasio kewirausahaan daerah diperkirakan meningkat. Melalui peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB serta rasio penyediaan akomodasi makan dan minum yang lebih baik, program ini berpotensi memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan.

#### **14. Pengembangan ekonomi hijau melalui pertanian perkotaan berbasis teknologi**

Program prioritas "Pengembangan ekonomi hijau melalui pertanian perkotaan berbasis teknologi" merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern, program ini berfokus pada penerapan teknik pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, seperti hidroponik, yang memungkinkan produksi tanaman tanpa tanah, mengurangi penggunaan pestisida, dan meningkatkan hasil pertanian di ruang terbatas. Salah satu langkah strategis utama dari program ini adalah pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan, yang memungkinkan pemanfaatan ruang di daerah perkotaan untuk kegiatan pertanian yang lebih produktif.

Selain itu, program ini juga mencakup penyediaan bibit dan varietas unggul yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Penggunaan bibit unggul diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian lokal, serta mempercepat adopsi pertanian berbasis teknologi. Selain itu, pengembangan ekonomi sirkular menjadi salah satu

pilar penting dalam mendukung keberlanjutan sistem pertanian perkotaan, dengan memanfaatkan limbah pertanian dan organik untuk mendukung keberlanjutan pertanian dan pengelolaan sampah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, indikator kinerja program ini antara lain adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, persentase sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan sampah, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, serta indeks ketahanan pangan. Target-target yang ditetapkan, seperti peningkatan PDRB sektor pertanian, menunjukkan komitmen untuk memajukan sektor ini, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dalam jangka panjang.

#### **15. Penguatan inklusi sosial, serta penguatan solidaritas dan toleransi antarumat beragama**

Program prioritas "Penguatan inklusi sosial, serta penguatan solidaritas dan toleransi antarumat beragama" merupakan salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Pemerintah Kota Binjai telah merumuskan berbagai strategi yang melibatkan pemberdayaan sosial serta peningkatan kerukunan antarumat beragama. Salah satu program utama dalam strategi ini adalah penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan generasi muda. Ini bertujuan untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, program bantuan sosial berbasis data juga menjadi pilar penting dalam memperkuat jaringan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat, sehingga mengurangi potensi ketimpangan sosial. Tidak hanya itu, program SAGA (Semangat Gotong Royong Antarwarga) juga dihadirkan untuk meningkatkan solidaritas antarwarga, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Dengan demikian, program ini dapat mempererat ikatan

sosial di kalangan warga Binjai, terlepas dari latar belakang agama atau suku.

Selanjutnya, Program Binjai Rumah Bersama untuk Semua Umat Beragama menjadi salah satu upaya strategis dalam mempromosikan kehidupan beragama yang lebih inklusif dan harmonis. Melalui program ini, diharapkan tercipta ruang-ruang sosial yang mendukung toleransi dan saling pengertian antarumat beragama. Sebagai tambahan, fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan sarana keagamaan juga menjadi fokus agar setiap umat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi. Secara keseluruhan, program prioritas ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis, dengan menjadikan inklusi sosial dan toleransi antarumat beragama sebagai landasan utama dalam pembangunan daerah. Target indikator kinerja yang ditetapkan, seperti peningkatan akses hunian layak, pengurangan tingkat kemiskinan, dan penguatan kerukunan antarumat beragama, diharapkan dapat terwujud pada tahun 2029 dengan pencapaian yang signifikan.

#### **16. Kehidupan yang Lebih Tertib, Aman dan Nyaman**

Program prioritas "Kehidupan yang Lebih Tertib, Aman dan Nyaman" bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif, aman, dan nyaman melalui serangkaian strategi yang terintegrasi. Salah satu strategi utama yang dilaksanakan adalah Program "GENTAR" (Generasi Tanpa Narkoba dan Kenakalan Remaja), yang berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Selain itu, penyelesaian tindak pidana yang cepat dan adil juga menjadi fokus utama dalam menciptakan ketertiban hukum yang lebih baik.

Untuk memperkuat integritas dan kepercayaan publik, program ini juga mengedepankan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang transparan, serta implementasi Restorative Justice yang melalui mediasi untuk memulihkan hubungan antara pelaku,

korban, dan masyarakat. Peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas, terutama dengan melibatkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan teratur.

Program ini juga mengembangkan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (Ormas) serta menjalankan inisiatif penindakan dan pencegahan terintegrasi terhadap judi online. Salah satu fokus utama yang menjadi prioritas adalah membangun kampung bebas narkoba sebagai bagian dari mendukung program pengentian peredaran narkoba. Semua langkah ini, yang disertai dengan target yang jelas dalam hal indikator kinerja, diharapkan dapat mencapai tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih tertib, aman, dan nyaman untuk masyarakat.

#### **d. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN**

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan dapat dilihat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Binjai memuat Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Binjai. Renja OPD merupakan dasar masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan guna mendukung Visi dan Misi Walikota Binjai.

Prioritas pembangunan Kota Binjai tahun 2025 berpedoman pada visi dan misi pembangunan Kota Binjai pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis, maka pembangunan Kota Binjai mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kota Binjai Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Serta Pengembangan Ekonomi Kreatif”, prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Bidang Kesehatan, melalui:
  - a. Penguatan rumah sakit, sarana dan prasarana serta peningkatan penanganan kesehatan;
  - b. Penyediaan tenaga medis yang terampil dan berkualitas;
  - c. Mengaktifkan pelayanan puskesmas selama 24 jam;
  - d. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung melayani pasien ke masyarakat;
  - e. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui aplikasi e-dokter.
  
2. Penguatan Bidang Ekonomi, melalui:
  - a. Pengembangan sentra industri kreatif yang sifatnya padat karya;
  - b. Pembinaan UMKM/IKM baik produk, pemasaran dan bantuan modal;
  - c. Pembinaan tenaga kerja terampil untuk peningkatan kesempatan kerja;
  - d. Mendorong pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui tumbuhnya wirausaha baru;
  
3. Penguatan Bidang Pendidikan, melalui:
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru, penyebaran guru, serta meningkatkan prestasi siswa;

- b. Memanfaatkan digitalisasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mempermudah proses belajar mengajar;
  - c. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan minimal sesuai aturan pemerintah;
  - d. Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk pencegahan penyakit masyarakat agar siswa dapat terhindar dari narkoba.
4. Penguatan Bidang Ketahanan Pangan, melalui:
- a. Meningkatkan ketersediaan pangan lokal dengan perbaikan teknologi budidaya dan penerapan GAP melalui sekolah lapang dan pendampingan;
  - b. Penyediaan benih/bibit unggul (bersertifikat) memanfaatkan lahan masyarakat/lahan tidur/marginal;
  - c. Memanfaatkan lahan rumah tangga untuk tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai tambahan makanan;
  - d. Mengembangkan budidaya perikanan dan peternakan;
  - e. Memberikan bantuan bibit kepada masyarakat;
  - f. Memberikan pembinaan kepada kelompok tani atau ternak;
  - g. Memberikan bantuan ternak kepada masyarakat melalui kelompok seperti kambing dan sapi;
  - h. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
5. Penguatan Bidang Pariwisata, melalui:
- a. Revitalisasi kawasan wisata alam atau budaya serta cagar budaya;
  - b. Peningkatan pariwisata melalui promosi, pelaksanaan event dan pertunjukan atau atraksi kebudayaan;
  - c. Pemasaran digital marketing untuk meningkatkan citra pariwisata;
  - d. Mengembangkan destinasi wisata seperti kuliner.
6. Penguatan Jaring Pengaman Sosial, melalui:
- a. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu (miskin) baik bantuan pangan tunai ataupun non tunai;
  - b. Meningkatkan penanganan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan kepada masyarakat miskin.

Tabel 1. 9  
Kegiatan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
3.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD
4.	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
5.	Fasilitasi Tugas DPRD	
6.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RS. Dr. RM. Djoelham
7.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
8.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
9.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
10.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
11.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	
12.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
13.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
14.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
15.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terlaksananya SIK	
16.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

17.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
18.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
19.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
20.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
21.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
22.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
23.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
24.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
25.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
26.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
27.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
28.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik	

	Fungsi Bangunan Gedung	
29.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
30.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
31.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
32.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
33.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan & Permukiman
34.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
35.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
36.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
37.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
38.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
39.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
40.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
41.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
42.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
43.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

44.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
45.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
46.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
47.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Ketenagakerjaan
48.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
49.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
50.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
51.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
52.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
53.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
54.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
55.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
56.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
57.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
58.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

		Ketenagakerjaan
59.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
60.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
61.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
62.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
63.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
64.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
65.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
66.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
67.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
68.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
69.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan

70.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan & Perlindungan Anak
71.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
72.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
73.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
74.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
75.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
76.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
77.	Pembangunan Sarana Pertanian	
78.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
79.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
80.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
81.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
82.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
83.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
84.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
85.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas

86.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup
87.	Pengelolaan Sampah	
88.	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas
89.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kependudukan & Pencatatan Sipil
90.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
91.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
92.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
93.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
94.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
95.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
96.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
97.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
98.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

99.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan
100.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
101.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
102.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
103.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
104.	Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
105.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
106.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
107.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi & UKM
108.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
109.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
110.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
111.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Penanaman Modal &

	Kabupaten/Kota	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
112.	Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	DISPORA	
113.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
114.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
115.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
116.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
117.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
118.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
119.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
120.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perpustakaan
121.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
122.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
123.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
124.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
125.	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan	

126.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
127.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
128.	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
129.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
130.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
131.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
132.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
133.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
134.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
135.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
136.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
137.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
138.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
139.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
140.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
141.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase terkoodinasi dan tersusunnya Rencana	
142.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	

	Daerah	PKPAD
143.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
144.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
145.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
146.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM
147.	Mutasi dan Promosi ASN	
148.	Pengembangan Kompetensi ASN	
149.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
150.	Pengembangan Kompetensi Teknis	
151.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
152.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	KESBANGPOL
153.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
154.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
155.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
156.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
157.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
158.	Administrasi Tata Pemerintahan	
159.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
160.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	

161.	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
162.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
163.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
164.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
165.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
166.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
167.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN
168.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
169.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
170.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
171.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

### 1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standart Pelayanan Minimal. Selanjutnya pada Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal disebutkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Pada pasal 3 (tiga) juga di jelaskan urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Hal ini berkesinambungan dengan terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Binjai yang akan di prioritaskan kepada:

#### 1. **Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar** (Misi 1)

Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan

masyarakat di Kota Binjai. Melalui perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis, serta penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata, diharapkan warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat. Program ini juga mencakup peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit, serta memastikan bahwa setiap orang, khususnya kelompok rentan, mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. **Terwujudnya SDM unggul** (Misi 1)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan kompetitif. Hal ini dapat dicapai melalui program pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses pendidikan formal dan non-formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mencetak SDM yang unggul, Kota Binjai dapat memastikan generasi muda siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

3. **Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan** (Misi 2)

Tujuan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan yang berdampak langsung pada inflasi daerah. Ketika pasokan pangan tersedia secara cukup dan merata, harga cenderung lebih stabil dan terjangkau, sehingga tekanan inflasi, terutama dari komponen makanan, dapat dikendalikan. Stabilitas harga ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan iklim usaha di sektor riil. Dalam konteks tersebut, pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan akan mendorong aktivitas ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan untuk mencerminkan keberhasilan program ini, karena meningkatnya akses pangan yang berkualitas dan terjangkau secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Binjai.

4. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan**  
(Misi 2)

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Pemerintah Kota Binjai akan berfokus pada pengembangan sektor ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa kesejahteraan warga meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Adapun pencapaian atas tujuan ini dideteksi melalui indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, dan Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.

5. **Peningkatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk rentan**

(Misi 2)

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya memperoleh jaminan hidup yang layak, perlindungan dari risiko sosial, serta akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ketika kelompok rentan tidak mendapatkan intervensi yang memadai, risiko keterpurukan ekonomi akan semakin tinggi dan memperparah tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, melalui berbagai program perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemerintah Kota Binjai berupaya memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. *Tingkat Kemiskinan* dijadikan indikator utama untuk mengukur efektivitas kebijakan ini, sebagai gambaran dalam memberikan perlindungan nyata dan inklusif kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

6. **Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan keluarga** (Misi 2)

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat Kota Binjai yang inklusif, harmonis, dan berdaya tahan terhadap berbagai tekanan sosial maupun budaya. Ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia

yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kerukunan antarumat beragama, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, tujuan ini juga menjawab tantangan kesenjangan gender dan potensi disintegrasi sosial. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) digunakan sebagai indikator utama karena mencerminkan tiga dimensi penting keluarga: ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Semakin tinggi nilai iBangga, semakin kuat pula pondasi sosial masyarakat yang menopang pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

7. **Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan berkelanjutan** (Misi 3)

Tujuan *Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan* menekankan pentingnya infrastruktur yang ramah lingkungan, tangguh terhadap bencana, dan mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Penurunan emisi gas rumah kaca dan indeks ketahanan lingkungan hidup (IKLH) menjadi indikator utama yang mencerminkan sejauh mana pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan ini secara langsung berkaitan dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi, penyediaan sanitasi yang aman, ketahanan terhadap krisis energi dan air, serta infrastruktur adaptif terhadap risiko bencana. Upaya ini juga mendukung komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem serta keselamatan generasi mendatang.

8. **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** (Misi 4)

Tujuan ini mencerminkan komitmen Kota Binjai dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, responsif, dan akuntabel. Indeks Reformasi Birokrasi digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kemajuan dalam pembenahan sistem administrasi pemerintahan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Tujuan ini mencakup penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik,

pengembangan tata kelola yang demokratis dan partisipatif, serta penguatan kerja sama antarkota dan lembaga sebagai strategi memperluas kapasitas pelayanan. Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal dan keuangan daerah menjadi pondasi penting dalam memastikan keberlanjutan program-program prioritas dan memperkuat daya saing kota. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di era digital dan keterbukaan informasi.

#### 9. **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** (Misi 4)

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia bagi seluruh warga Kota Binjai. Persentase penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan dan ketegasan aparat dalam menegakkan aturan secara adil dan konsisten. Upaya ini tidak hanya mencakup aspek penindakan, tetapi juga edukasi hukum kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya taat aturan dan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban. Selain itu, tujuan ini mencakup peningkatan perlindungan terhadap hak-hak warga, pencegahan kriminalitas, serta koordinasi intensif dengan aparat keamanan dan lembaga hukum dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh penduduk menjadi fondasi penting dalam mendorong kegiatan sosial-ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Kota Binjai 2025-2029 mencerminkan komitmen untuk menciptakan perubahan positif yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta infrastruktur yang ramah lingkungan, tujuan-tujuan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. Setiap langkah yang diambil akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Binjai dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Binjai yang telah dituangkan dalam kebijakan RPJMD dan RKPD adalah sebagai berikut :

Table 1.10  
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Binjai Tahun 2025

Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RPJMD
Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dinas PUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program	Program

	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Total	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Total
	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggara An Penataan Ruang	Program Penyelenggara An Penataan Ruang
Perumahan & Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Trantibumlinmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulang An, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulang An, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial

	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Capaian Kinerja Makro meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan.

##### 1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Berdasarkan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 Kota Binjai sebesar 79,20 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 78,67 Adapun perkembangan dari masing-masing komponen penyusun IPM di Kota Binjai tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

TABEL KOMPONEN PENYUSUN IPM KOTA BINJAI 2021-2025

NO	Komponen Penyusun	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Harapan Hidup	72.45	72.79	74. 18	74. 45	74. 81
2	Harapan Lama Sekolah	13,63	13.87	14. 17	14. 18	14. 19
3	Rata-Rata Lama Sekolah	10,94	11.18	11.19	11.20	11.21

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka komponen penyusun IPM dari tahun 2024 smpai dengan 2025 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan sistem perekonomian sudah mulai membaik

## 2. ANGKA KEMISKINAN

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Binjai yaitu Rp. 577.220 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 13.860 orang sedangkan tahun 2025, garis kemiskinan di Kota Binjai yaitu Rp. 600.451 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 13.870

Berikut data Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Binjai Tahun 2021-2025 :

Tabel 2. 2

TABEL GARIS KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA BINJAI 2021-2025

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2021	466.554	16.460	5.81
2	2022	499.451	14.610	5.10
3	2023	538.638	13.850	4.79
4	2024	577.220	13.860	4.75
5	2025	600.451	13.870	4.71

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa walaupun jumlah penduduk miskin bertambah namun persentase Penduduk Miskin di Kota Binjai pada tahun 2025 berkurang. Hal ini disebabkan karena nilai Rupiah penentu kemiskinan mengalami peningkatan sehingga membuktikan perekonomian di Kota Binjai sudah mengalami peningkatan.

## 3. ANGKA PENGANGGURAN

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengangguran Terbuka adalah bagian dari angkatan kerja

yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2. 3

Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Berkegiatan Selama Seminggu

Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki & Perempuan
Angkatan Kerja	<b>88.402</b>	<b>62.354</b>	<b>15.0756</b>
a. Bekerja	82.515	60.148	14.2663
b. Pengangguran	5.887	2.206	8.093
Bukan Angkatan Kerja	<b>26.598</b>	<b>55.090</b>	<b>81.688</b>
<b>Total</b>	<b>115.000</b>	<b>117.444</b>	<b>232.444</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,87	53,09	64,86
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,66	3,54	5,37

Tabel 2.4

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
1.	2021	62,77	7,86
2.	2022	54,89	6,36
3.	2023	62,79	6,10
4.	2024	64,22	5,44
5.	2025	64,86	5,37

Dari Tabel di atas dapat kita simpulkan tingkat pengangguran di Kota Binjai mengalami penurunan yang menggambarkan kondisi perekonomian di Kota Binjai semakin meningkat.

#### 4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi ialah .proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut

merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indicator lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan struktur ekonomi ialah jenis sektor dominan yang menjadi pendorong/ penyumbang utama dalam perekonomian.

Salah satu indicator untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi dan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui PDRB dapat diketahui kinerja ekonomi, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB per kapita suatu daerah. Peranan setiap sektor dalam menghasilkan PDRB merupakan hal yang paling penting untuk melihat gambaran perekonomian dan menjadi bahan perencanaan dalam menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Binjai atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 15.588,75 milyar dan tahun 2025 sebesar 16.644,36 milyar.

## 5. PENDAPATAN PER KAPITA

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dilihat dari tingginya pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pembangunan di Kota Binjai, salah satu indikatornya adalah dari perhitungan pendapatan per kapita.

Selain dari PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita juga merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai indicator mengenai gambaran umum tingkat kesejahteraan penduduk. Namun, PDRB per kapita tidak serta menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat yang sebenarnya karena PDRB yang tinggi suatu wilayah belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk di wilayah tersebut.

Tabel. 2.5  
TABEL PDRB PER KAPITA KOTA BINJAI

NO	TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
1	2021	41.737,06	27.659,83
2	2022	44.498,65	28.416,87
3	2023	47.678,59	29.370,13

4	2024	50.749,60	30.348,27
5	2025	53.530,55	31.330,34

## 6. KETIMPANGAN PENDAPATAN

Untuk melihat pemerataan pendapatan yang diterima masyarakat, dilakukan penghitungan distribusi pendapatan melalui analisis penghitungan Ketimpangan Pendapatan. Ketimpangan Pendapatan di masyarakat tidak dapat dihindari dikarenakan adanya perbedaan pendapatan dan pengeluaran di berbagai lapisan masyarakat. Dimana salah satu faktor pendukungnya adalah tingkat pendidikan dan tingkat keahlian yang berbeda-beda. Pada tahun 2025 Ketimpangan Pendapatan di Kota Binjai mencapai 0,320 dimana hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang sebesar 0,3120.

Dari hasil penjelasan indikator Capaian Kinerja Makro di atas tadi, berikut rangkuman tabel indikator dimaksud :

Tabel. 2.6

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,67	79,20	0,67
2	Angka Kemiskinan	4,75	4,71	4,02
3	Angka Pengangguran	5,44	5,37	-1,29
4	Pertumbuhan Ekonomi	15.588,75	16.644,36	6,77
5	Pendapatan Per Kapita	50.749,60	53.530,55	5,48
6	Ketimpangan Pendapatan	0.3180	0.320	2,56

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

### 2.2.1 IKK Hasil Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pendidikan	1.	Persentase Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	25,47	Dinas Pendidikan Kota Binjai	
		2.	Persentase Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	82,12	Dinas Pendidikan Kota Binjai	
		3.	Persentase Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	54,15	Dinas Pendidikan Kota Binjai	
		4.	Persentase jamban dalam kondisi baik	54,83	Dinas Pendidikan Kota Binjai	
		5.	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	52,98	Dinas Pendidikan Kota Binjai	
2.	Kesehatan	1.	Persentase Angka Kematian Ibu	0,11	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		2.	Persentase Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	0,69	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	92,13	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	86,75	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		5.	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	88,79	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	57,65	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		7.	Persentase Pelayanan	94,85	Dinas Kesehatan	

			kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar		Kota Binjai	
		8.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	53,86	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,71	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		10.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	46,10	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	90,45	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		12.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		13.	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
		14.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	65,14	Dinas Kesehatan Kota Binjai	
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	1.	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Tidak Ada Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai	
		2.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	75,79	Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai	

		3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	18,53	Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai	
		4.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	5,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	
		5.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	9,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	
		6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	
		7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/ Kota	100	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		9.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	
		10.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	

			Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota		Ruang Kota Binjai	
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>	1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran	Dinas Perumahan dan pemukiman Rakyat	
		2.	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran	Dinas Perumahan dan pemukiman Rakyat	
		3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran	Dinas Perumahan dan pemukiman Rakyat	
		4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran	Dinas Perumahan dan pemukiman Rakyat	
<b>5.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Belum dibuat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai	
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	57,14	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	
		3.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	
		4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tidak Ada Anggaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai	
		5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai	

			evakuasi korban bencana			
		6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai	
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	37,86	Dinas Sosial Kota Binjai	
		2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial Kota Binjai	
		3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial Kota Binjai	
		4.	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial Kota Binjai	
		5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	Dinas Sosial Kota Binjai	
		6.	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	24,14	Dinas Sosial Kota Binjai	

## 2.2.2 IKK Hasil Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Tenaga Kerja</b>	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Tidak dapat dilaksanakan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan
		2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	66,92	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan
		3.	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan
2.	<b>Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	1.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas P3AM Kota Binjai
		2.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas P3AM Kota Binjai
3.	<b>Pangan</b>	1.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14,79	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai
4.	<b>Pertanahan</b>	1.	Persentase Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	53	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai
		2.	Persentase Kescsuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	38,30	Dinas Perumahan dan Kawasan

					Pemukiman Kota Binjai	
		3.	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Belum dilegalkan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai	
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	1.	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	73,33	Dinas Lingkungan Hidup kota Binjai	
		2.	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	63,02	Dinas Lingkungan Hidup kota Binjai	
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	1.	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	17,06	Dinas Dukcatpil Kota Binjai	
		2.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	65,06	Dinas Dukcatpil Kota Binjai	
		3.	Persentase Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	50	Dinas Dukcatpil Kota Binjai	
		4.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	98,79	Dinas Dukcatpil Kota Binjai	
		5.	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	Dinas Dukcatpil Kota Binjai	
		6.	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	81,01	Dinas Dukcatpil Kota Binjai	
		7.	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	71,18	Dinas Dukcatpil Kota Binjai	
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100	Kota Binjai tidak ada desa	
		2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100	Kota Binjai tidak ada desa	

		3.	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	100	Kota Binjai tidak ada desa	
<b>8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	1.	Persentase Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	99,52	Dinas PP dan KB Kota Binjai	
		2.	Persentase Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	20,31	Dinas PP dan KB Kota Binjai	
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4,13	Dinas PP dan KB Kota Binjai	
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>	1.	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,64	Dinas Perhubungan Kota Binjai	
		2.	Vc Ratio	0,52	Dinas Perhubungan Kota Binjai	
		3.	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Belum dilaksanakan	Dinas Perhubungan Kota Binjai	
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	12,20	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	47,30	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
		3.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik	23,94	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
<b>11.</b>	<b>Koperasi Usaha</b>	1.	Persentase Pertumbuhan	-45,02	Dinas Koperasi	

	<b>Kecil dan Menengah</b>		Volume Usaha Koperasi		dan UKM Kota Binjai	
		2.	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	100	Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai	
<b>12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>	1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-45,36	Dinas PMPPTSP Kota Binjai	
		2.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	590,94	Dinas PMPPTSP Kota Binjai	
<b>13.</b>	<b>Kepemudaan Olahraga</b>	1.	Persentase Tingkat Partisipasi dalam ekonomi Mandiri	1,21	Dispora Kota Binjai	
		2.	Persentase Tingkat Partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan	23,14	Dispora Kota Binjai	
		3.	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	15,58	Dispora Kota Binjai	
		4.	Persentase Jumlah atlet berprestasi	66,67	Dispora Kota Binjai	
<b>14.</b>	<b>Statistik</b>	1.	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
<b>15.</b>	<b>Persandian</b>	1.	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Belum dilaksanakan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>	1.	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	100	Dinas Pariwisata Kota Binjai	
		2.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	-8,71	Dinas Pariwisata Kota Binjai	
<b>17.</b>	<b>Perpustakaan</b>	1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,39	Dinas Perpustakaan Kota Binjai	
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	49,9	Dinas Perpustakaan Kota Binjai	

<b>18.</b>	<b>Kearsipan</b>	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	89,41	Dinas Perpustakaan Kota Binjai	
------------	------------------	----	---	-------	--------------------------------	--

### 2.2.3 IKK Hasil Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Kelautan dan Perikanan	1.	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	27,98	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
		2.	Persentase Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
2.	Pariwisata	1.	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	17,34	Dinas Pariwisata Kota Binjai	
		2.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-43,40	Dinas Pariwisata Kota Binjai	
		3.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	19,70	Dinas Pariwisata Kota Binjai	
3.	Pertanian	1.	Peningkatan produksi tanaman pangan	-16,64	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
		2.	Peningkatan Produksi Hortikultura	-25,26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
		3.	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	-99,05	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	
		4.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Tidak Ada Penyakit Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan	

			(diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)		Pertanian Kota Binjai	
<b>4.</b>	<b>Perdagangan</b>	1.	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	17,73	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	
<b>5.</b>	<b>Perindustrian</b>	1.	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Tidak dilaksanakan	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	
		2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	1,09	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	
		3.	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	-47,79	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	
		4.	Persentase realisasi investasi sektor industri dan	43,44	Dinas Tenaga Kerja,	

			kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor		Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	
--	--	--	--	--	---	--

#### 2.2.4 Indikator Kinerja Kunci Untuk Penunjang Urusan Pemerintah

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Perencanaan</b>	1. Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan APBD	100	BAPERIDA Kota Binjai	
2.	<b>Keuangan</b>	1. Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	46,91	BPKAD Kota Binjai	
		2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15,84	BPKAD Kota Binjai	
		3. Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	58,99	BPKAD Kota Binjai	
		4. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	7	BPKAD Kota Binjai	
3.	<b>Kelembagaan,Kepegawaian,Pendidikan danPelatihan</b>	1. Persentase ASN Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,12	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	
4.	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100	BAPERIDA Kota Binjai	

<b>5.</b>	<b>Pengawasan</b>	1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,05	Inspektorat Kota Binjai	
		2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Kota Binjai	
		3.	Manajemen Risiko Indeks	2,98	Inspektorat Kota Binjai	
		4.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	68,45	Inspektorat Kota Binjai	
<b>6.</b>	<b>Pengadaan</b>	1.	Tingkat Kematangan UKPBJ	35,56	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sedako Binjai	
		2.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sedako Binjai	
		3.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sedako Binjai	
<b>7.</b>	<b>Hubungan Perwakilan Daerah dan DPRD</b>	1.	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat	BPKPAD	
		2.	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	15,38	Sekretaris DPRD	
<b>8.</b>	<b>Pelayanan Publik</b>	1.	Penilaian maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	75,87	Bagian Organisasi Setdako Binjai	

### 2.2.5 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Pemerintah Kota Binjai melaksanakan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Binjai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis berdasarkan Revisi RPJMD Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Binjai. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.7

Target Indikator Kinerja Utama Kota Binjai Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Perangkat Daerah	Target 2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Seluruh OPD	BB
2.	Opini BPK	Opini	BPKPAD Inspektorat	WTP
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	BKD	75,00
4.	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	Bag. Pemerintahan Setdako	3,38
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Dinas PUPR Dinas PKP	86
6.	Persentase kondisi jalan baik	Persen	Dinas PUPR	95,00
7.	Persentase air Minum Kota	Persen	Dinas PUPR	100
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Dinas LH	64,00
9.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	Dinas Tenaker & Perindag Dinas Koperasi & UMKM Dinas	11,90
10.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen		30,50
11.	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen		41,80

12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Pariwas ata	5,44
13.	Indeks Pendidikan	Poin	Dinas Pendidik an	76,72
14.	Indeks Kesehatan	Poin	Dinas Kesehata n Dinas PP dan KB	83,77
15.	Indeks Pengeluaran	Poin	Seluruh OPD	79,73

- b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 8

Target Indikator Kinerja Utama Kota Binjai Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	66,67*
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75,00	78,73
4.	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,38	2.7697
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	86	83,8
6.	Persentase kondisi jalan baik	Persen	95,00	71
7.	Persentase air Minum Kota	Persen	100	98,50
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,00	66,36
9.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,90	11,47
10.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,50	30,72
11.	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,80	33,48

12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,44	5,37
13.	Indeks Pendidikan	Poin	76,72	76,78
14.	Indeks Kesehatan	Poin	83,77	84,32
15.	Indeks Pengeluaran	Poin	79,73	76,73

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2. 9  
Target Indikator Kinerja Utama Kota Binjai Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	66,67*
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	74.52	78.73
4.	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	2.667	2.7697
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	83,3	83,8
6.	Persentase kondisi jalan baik	Persen	90,00	71
7.	Persentase air Minum Kota	Persen	100	98,50
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,81	66,36
9.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,47	11,47
10.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30.25	30.72
11.	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	33,38	33,48
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,44	5,37
13.	Indeks Pendidikan	Poin	76,72	76,78
14.	Indeks Kesehatan	Poin	83.77	84,32

15.	Indeks Pengeluaran	Poin	75,76	76,73
-----	--------------------	------	-------	-------

- d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2. 10  
Target Indikator Kinerja Utama Kota Binjai Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD (2021-2026)	Realisasi 2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	66,67*
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
3.	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	81	78,73
4.	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,40	2.7697
5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	89 (A)	83,8
6.	Persentase kondisi jalan baik	Persen	96	71
7.	Persentase air Minum Kota	Persen	60	98,50
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,7	66,36
9.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	12	11,47
10.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,7	30,72
11.	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	42	33,48
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6	5,37
13.	Indeks Pendidikan	Poin	76,96	76,78
14.	Indeks Kesehatan	Poin	82,68	84,32
15.	Indeks Pengeluaran	Poin	81,43	76,73

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tabel 2. 11

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 644,847,017,115.22	Rp 583,018,447,898.56	90%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 79,293,106,358.00	Rp 63,571,140,578.13	80%
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 4,996,256,098.00	Rp 4,488,854,295.00	90%
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 83,702,734,655.00	Rp 78,519,800,019.00	94%
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 951,636,804.00	Rp 697,907,405.00	73%
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 517,233,000.00	Rp 433,314,488.00	84%
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 703,702,846.00	Rp 57,200,000.00	8%
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 5,431,757,000.00	Rp 2,235,345,850.00	41%

9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 8,492,813,000.00	Rp 8,390,238,130.00	99%
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 3,531,225,006.00	Rp 3,879,225,836.00	110%
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 5,014,550,489.00	Rp 2,263,828,300.00	45%
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 19,638,564,890.00	Rp 24,288,012,197.00	124%
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 9,860,976,765.00	Rp 3,483,952,985.00	35%
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 565,572,814.00	Rp 83,690,435.00	15%
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 524,185,545.60	Rp 282,214,717.00	54%
16	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 273,600,000.00	Rp 0.00	0%
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 4,862,728,550.00	Rp 7,983,087,593.00	164%
19	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 20,000,000.00	Rp 0.00	0%
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 7,526,400,000.00	Rp 9,241,361,993.00	123%
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 4,246,720,512.00	Rp 4,232,157,356.00	100%
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 48,000,000.00	Rp 40,800,000.00	85%
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 110,003,646.26	Rp 103,562,969.00	94%

24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 151,061,762.00	Rp 52,721,500.00	35%
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 409,738,604.00	Rp 337,615,464.00	82%
26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 89,731,697.14	Rp 81,675,261.00	91%
27	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 136,611,672.00	Rp 19,778,400.00	14%
28	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 226,525,846.00	Rp 139,292,680.00	61%
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 53,883,672.00	Rp 300,293,400.00	557%
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 2,531,965,262.00	Rp 1,548,103,678.00	61%
31	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 62,399,258.00	Rp 22,048,200.00	35%
32	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 49,211,672.00	Rp 46,978,400.00	95%
33	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 127,282,600.00	Rp 90,609,400.00	71%
34	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 120,522,010.00	Rp 115,381,600.00	96%
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 69,414,972.00	Rp 53,895,600.00	78%
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 11,033,699.00	Rp 10,846,199.00	98%

37	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 391,060,520.00	Rp 293,425,477.00	75%
38	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 381,213,690.00	Rp 162,942,352.00	43%
39	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 9,394,944.00	Rp 6,944,944.00	74%
40	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 216,584,842.00	Rp 99,010,601.00	46%
41	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 183,779,500.00	Rp 131,653,000.00	72%
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 1,886,933,011.00	Rp 1,770,848,525.00	94%
43	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 70,922,702.97	Rp 26,072,650.00	37%
44	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 837,553,923.01	Rp 709,301,075.00	85%
45	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 48,701,395.18	Rp 26,615,760.00	55%
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 24,405,371.31	Rp 9,063,300.00	37%
47	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 104,681,630.40	Rp 51,380,500.00	49%
48	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 8,845,277.76	Rp 129,200,000.00	1461%
49	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN	Rp 205,498,579.96	Rp 191,307,647.00	93%

	HIDUP			
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 129,999,732.96	Rp 120,151,000.00	92%
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 1,551,050,115.00	Rp 1,853,638,505.00	120%
52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 106,599,565.50	Rp 95,506,897.00	90%
53	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 38,919,080.85	Rp 17,324,825.00	45%
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 7,971,339,134.54	Rp 8,827,901,832.00	111%
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 451,423,500.00	Rp 462,536,000.00	102%
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 27,520,000.00	Rp 0.00	0%
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 12,270,000.00	Rp 5,205,000.00	42%
58	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 614,210,429.00	Rp 352,187,050.00	57%
59	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 2,620,257,147.00	Rp 2,364,425,312.00	90%
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 1,148,825,000.00	Rp 1,201,819,685.00	105%

61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 5,247,023,510.00	Rp 5,533,550,504.00	105%
62	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 2,352,985,870.50	Rp 2,541,461,666.00	108%
63	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2,712,521,843.48	Rp 2,602,718,572.00	96%
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 189,473,240.00	Rp 62,128,200.00	33%
65	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 118,442,188.00	Rp 62,384,680.00	53%
66	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 99,999,344.64	Rp 34,223,812.00	34%
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 2,058,260,000.00	Rp 2,070,895,660.00	101%
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 414,982,904.00	Rp 267,697,269.00	65%
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 2,317,271,817.00	Rp 2,017,027,068.00	87%
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	100%
71	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 996,028,500.00	Rp 428,036,401.00	43%
72	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 179,004,916.00	Rp 112,169,160.00	63%

73	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 14,473,208.00	Rp 0.00	0%
74	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Rp 7,658,800.00	Rp 0.00	0%
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 280,254,360.00	Rp 270,119,503.00	96%
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp 192,000,000.00	Rp 181,701,738.00	95%
77	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 33,326,260.00	Rp 0.00	0%
78	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 67,251,500.00	Rp 110,054,200.00	164%
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 166,249,212.00	Rp 161,536,189.00	97%
80	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 881,899,405.00	Rp 282,126,219.00	32%
81	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 10,322,069,290.00	Rp 9,025,469,386.00	87%
82	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 28,005,098,690.00	Rp 28,795,388,945.00	103%
83	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2,834,876,724.00	Rp 1,989,041,269.00	70%
84	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 893,287,731.00	Rp 594,863,653.00	67%
85	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 1,629,811,737.00	Rp 1,361,202,167.00	84%

	DAERAH			
86	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 19,051,926,659.60	Rp 2,817,260,874.00	15%
87	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2,105,815,962.00	Rp 1,310,212,644.00	62%
88	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5,599,978,446.12	Rp 5,248,040,790.00	94%
89	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 84,671,991.00	Rp 118,422,800.00	140%
90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 284,015,226.00	Rp 494,261,375.00	174%
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 1,141,657,684.00	Rp 1,179,280,000.00	103%
92	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 575,559,822.00	Rp 376,381,875.00	65%
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 45,817,072.00	Rp 29,291,487.00	64%
94	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 8,062,100,556.00	Rp 7,742,306,357.00	96%
95	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 62,190,500.00	Rp 20,625,000.00	33%
96	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 989,975,064.00	Rp 1,015,048,876.00	103%

97	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 999,776,963.00	Rp 1,598,073,963.00	160%
98	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 106,607,365.00	Rp 195,561,365.00	183%
99	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 107,887,942.00	Rp 90,959,400.00	84%
100	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 129,807,680.00	Rp 103,302,770.00	80%
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp 1,009,702,196,896.00</b>	<b>Rp 900,230,670,600.69</b>	<b>89%</b>

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 89% (tabel 2.28) dan Rata-rata

% capaian kinerja sebesar 95% (tabel 2.1) maka tingkat efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [89\% \times (1/95\%)] \times 100\%$$

$$= 0,0631$$



f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tabel 2. 12

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Program Pendukung Pencapaian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Indeks Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Persentase akses air minum kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	<p>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</p> <p>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</p> <p>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</p> <p>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM</p> <p>PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</p> <p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</p> <p>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</p> <p>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</p> <p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</p>
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	<p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</p> <p>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</p> <p>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</p>
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<p>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</p> <p>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING</p> <p>KEPEMUDAAN</p> <p>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA</p> <p>MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</p>

6	Meningkatn ya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
7	Meningkatn ya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehata n	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)

8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
---	---------------------------------------	--------------------	---

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

##### **A. Dasar Hukum, Gambaran Umum dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya, disebutkan juga bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 Ayat (11) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah “penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Pemberian tugas pembantuan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah, pengelolaan pembangunan dalam pelayanan umum. Tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah da Desa.

##### **B. Tugas Pembantuan Pusat Kepada Daerah Kabupaten/Kota.**

Kota Binjai tahun 2025 tidak mendapat Tugas Pembantuan Pusat ke Pemerintah Kota Binjai.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### A. Urusan Pendidikan

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan;

##### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No.	Nama Program	Target Capaian %
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	100 %
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100 %

##### 3. Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025			Target 2024
		Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Capaian = $(4):(3) \times 100\%$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pendidik an Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	10.502	2675	25,47	100 %
2. Pendidik an Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang	50.250	41.263	82.12	100

	berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTS)				
3. Pendidik an Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi kesetaraan.	530	287	54.15	100 %

#### 4. Alokasi Anggaran

No.	Nama Program /Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	83.536.516.444,54	32.760.526.652,13	39,2
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.785.577.663,00	4.490.324.295,00	93,8

#### 4. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pelaksana Program dan Kegiatan Untuk pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Binjai sebanyak 2.341 orang.

#### 5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Kota Binjai antara lain:

- a. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;

- b. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar;
- c. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan Standar Nasional
- d. Guru bersertifikasi pada layanan PAUD masih rendah, belum semua anak usia 5-6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD;
- e. Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik;
- f. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan.

Strategi pencapaian SPM Kota Binjai Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Memudahkan perijinan pendirian PAUD dan ijin operasional PAUD;
- b. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
- c. Pemenuhan alat peraga siswa PAUD untuk siswa miskin;
- d. Pemberian insentif untuk guru PAUD yang masih berstatus honorer;
- e. Pemberian subsidi biaya kuliah untuk guru PAUD yang belum S1;
- f. Pemenuhan standar guru PAUD melalui bimtek peningkatan kualitas guru PAUD;
- g. Pendampingan proses akreditasi PAUD;
- h. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik miskin jenjang SMP;
- i. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SMP;
- j. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SD;
- k. Pemenuhan standar sarana prasarana sesuai standar nasional pendidikan jenjang SMP;
- l. Pemenuhan perlengkapan dasar bagi anak tidak sekolah dan peserta didik miskin jenjang SD;
- m. Pemberian insentif guru honorer jenjang SD dan SMP;

- n. Penambahan kuota seleksi dan diklat calon kepala sekolah jenjang SD dan SMP;
- o. Pemberian insentif peningkatan kualifikasi untuk guru SD dan SMP;
- p. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang SD dan SMP;
- q. Pemberian insentif untuk tutor kesetaraan paket A , B dan C;
- r. Pemenuhan standar sarana prasarana untuk PKBM;
- s. Pemberian biaya operasional untuk lembaga PKBM;
- t. Pemenuhan perlengkapan sekolah untuk PKBM.

## B. Urusan Kesehatan

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV.

### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No.	Nama Program	Target Capaian
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%

### 3. Ralisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapa	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian n =(4):(3) x100%	

		t Pelayana n			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.057	4.659	92,74	100%
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan	5.042	4.374	86,75	100%
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir umur 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	4.844	4.301	88,79	100%
4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang berumur 0 – 59 bulan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan	24.810	14.303	57,65	100%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatak	47.512	45.064	94,85	100%

	an pelayanan kesehatan standar				
6. Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15 – 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	198.080	106.683	53,86	100%
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	33.806	25.258	74,71	100%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan standar	69.333	31.964	46,10	100%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita	Jumlah orang yang berusia 15	6.956	6.292	90,45	100%

Diabetes Mellitus	tahun keatas yang menderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan standar				
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	435	435	100	100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah orang terduga Tuberculosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	7826	7826	100	100%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan	9742	6346	65,14	100%

	an pelayanan kesehatan standar				
--	---	--	--	--	--

#### 4. Alokasi Anggaran

No.	Nama Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.184.961.009,0 0	49.272.878.496,86	55,8
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	791.053.071,00	647.567.405,00	81,8
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	517.233.000,00	433.314.488,00	83,7
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	357.299.200,00	40.800.000,00	11,4
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	88.184.961.009,0 0	49.272.878.496,86	55,8

	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
--	--	--	--	--

## 5. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai sebanyak 773 Orang.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang timbul dalam pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Binjai pada masing-masing indikator antara lain :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih pada fasilitas kesehatan pemerintah masih kurang;
- b. Masih rendahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor terkait dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan
- c. Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- d. Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas;
- e. Warga mendapatkan pelayanan kesehatan di luar wilayah kerja Kota Binjai;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan diri untuk Skrining penyakit;
- g. Sasaran yang digunakan sebagai pembanding masih menggunakan sasaran estimasi bukan sasaran riil;
- h. Tidak maksimalnya penggunaan anggaran karna tidak disusun berdasarkan analisis masalah di puskesmas;
- i. Rendahnya sistem pencatatan dan pelaporan penderita;
- j. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat;
- k. Masih tingginya stigma dan diskriminatif terhadap penderita penyakit menular;
- l. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal;

- m. Masih belum terintegrasi pelaporan dan perencanaan ditingkat Puskesmas dengan Dinas Kesehatan;
- n. Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif – preventif;
- b. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan;
- c. Pengembangan pembiayaan kesehatan;
- d. Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring;
- e. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular & Tidak Menular;
- f. Penguatan manajemen kesehatan.

### C. Urusan Pekerjaan Umum

#### 1) Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah.

#### 2) Target Pencapaian SPM oleh Daerah

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100%
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%

#### 3) Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapa	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian n =(4):(3) x100%	

		t Pelayana n			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	2.356	2.356	100	100
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air Limbah Domestik	1406	1267	100	100

#### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.567.513.000,00	8.390.238.130,00	97,9
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.957.420.006,00	3.879.225.836,00	98

## **5) Dukungan Personil**

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai sebanyak 92 orang.

## **6) Permasalahan dan Solusi**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Kota Binjai antara lain adalah:

- a. Belum tersedianya data sanitasi yang valid sebagai database yang akurat.
- b. Belum tersedianya regulasi seperti Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap bangunan gedung untuk memiliki tangki septik yang sesuai Standar Nasional Indonesia serta mengatur pengelolaan air limbah domestik.
- c. Sulitnya kondisi lahan di bagian hilir pemukiman yang mengakibatkan keterbatasan dalam hal pembangunan tangki septik baik itu individual maupun komunal.
- d. Masih minimnya kesadaran masyarakat khususnya Kelompok Penerima dan Pengelola (KPP) Tangki Septik Komunal dalam hal perawatan bangunan;
- e. Minimnya armada sedot tinja,
- f. Terbatasnya Anggaran untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang aman.

Strategi yang dilaksanaka dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik

melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

#### D. Urusan Perumahan Rakyat

##### 1) Jenis Pelayanan Dasar

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

##### 2) Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Capaian %
1	Program Pengembangan Perumahan	100

##### 3) Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian = $(4):(3) \times 100\%$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh	0	0	0	100%

bencana kota.	rumah layak huni				
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	100%

#### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.449.737.843,71	24.025.987.107,00	94,40

#### 5) Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai sebanyak 84 Orang.

## 6) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Kota Binjai untuk memenuhi Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

- a. Terbatasnya Anggaran yang menyebabkan Perangkat Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan;
- b. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait Standar Pelayanan Minimal.
- c. Ancaman bencana di Kota Binjai antara lain banjir dan angin puting beliung
- d. Beberapa kecamatan di Kota Binjai yang masuk ke dalam kawasan rawan banjir.
- e. Banyaknya masyarakat Kota Binjai yang tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya seperti pada daerah sepadan sungai (DSS), daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan daerah rawan bencana. Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi.

Strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi.

## E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 1) Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

### 2) Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

No.	Nama Program/ Kegiatan	Target Pencapaian %
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100

2.	Program Penanggulangan Bencana	100
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100

### 3) Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapat Pelayanan	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian =(4):(3) x100%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	18	18	100	100
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	310.932	310.932	100	100
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	310.932	310.932	100	100

an terhadap bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	28.739	28.739	100	100
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	57	57	100	100

#### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.858.557.184,00	3.951.357.356,00	81,3
2.	Program Penanggulangan Bencana	9.341.908.499,00	9.241.316.993,00	98,9

## **5) Dukungan Personil**

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja : 211 orang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 271 orang.

## **6) Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi Kota Binjai dalam pemenuhan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih pada fasilitas trantibumlinmas pemerintah masih kurang;
- b. Masih rendahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor terkait dalam mendukung pelaksanaan pelayanan trantibumlinmas;
- c. Sasaran yang digunakan sebagai pembanding masih menggunakan sasaran estimasi bukan sasaran riil;
- d. Tidak maksimalnya penggunaan anggaran karna tidak disusun berdasarkan analisis masalah di trantibumlinmas;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan trantibumlinmas yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan trantibumlinmas yang belum maksimal;
- f. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu;
- g. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya serta kebutuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan;
- h. Belum tersedianya Renkon skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana;
- i. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana;
- j. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
- k. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana;
- l. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana;

m Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Binjai yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan pemerintah kab/kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

Mendasarkan pada permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, upaya pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM perlu dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan
- b. Pengembangan pembiayaan Trantibumlinmas;

Strategi penanggulangan bencana dibagi dalam 3 bagian yaitu Pra Bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, berikut penjelasan secara rincinya:

a. Pra Bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

b. Saat Terjadi Bencana

Tahap Tanggap Darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana

c. Pasca Bencana

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

Sementara strategi terkait informasi raawan bencana adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- b. Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

## F. Urusan Sosial

### 1) Jenis Pelayanan Dasar

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial dasar;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

### 2) Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Capaian %
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	100 %

### 3) Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025			Target 2022
		Jumlah Orang yang Berhak Mendapat	Jumlah Orang Yang terlayani	Capaian n =(4):(3) x100%	

		Pelayana n			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	206	78	37,86	100%
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1	1	100	100%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	4	4	100	100%
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	28	28	100	100%

	diluar panti				
5. Penanggung ngan tanggap,dar urat terhadap korban bencana alam	Jumlah Warga Negara korban bencana alam yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	8027	8027	100	100%

#### 4) Alokasi Anggaran

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Program Pemberdayaan Sosial	170.787.699,00	40.800.000,00	23,8
2.	Program Rehabilitasi Sosial	140.339.800,26	103.562.969,00	73,7
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	71.854.727,00	52.721.500,00	73,4
4.	Program Penanganan Bencana	401.224.496,00	337.615.464,00	84,1

#### 5) Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara pelaksana Program dan Kegiatan untuk pencapaian dan penerapan SPM urusan Sosial pada Dinas Sosial sebanyak 25 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 52 orang.

## 6) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Kota Binjai dalam pemenuhan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kemiskinan di Binjai masih tinggi;
- b. Belum sepenuhnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani;
- c. Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan korban bencana;
- d. Belum semua jenis layanan yang ada dalam SPM Urusan Sosial dilaksanakan (Baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 Tahun 2019 );
- e. Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan permakanan, penyediaan sandang, dan penyediaan perbekalan kesehatan belum diberikan kepada penerima sasaran;
- f. Terbatasnya kapasitas SDM dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pemenuhan SPM, terutama dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada penerima layanan SPM;
- g. Kurang mendukungnya sarana dan prasarana aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;

Strategi yang diambil adalah :

- a. Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Binjai secara berkala dan dilakukan secara online.
- b. Meningkatkan keterampilan pilar-pilar sosial khususnya memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat kecamatan.
- c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.

Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Binjai 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kota Binjai sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan Pemerintah.

Secara substantive Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Binjai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normative, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan urusan Konkuren yakni 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar..

Keberhasilan pembangunan di Kota Binjai, pada hakekatnya merupakan perwujudan sinergitas kinerja eksekutif, legislative, masyarakat dan dunia usaha atau semua *stake holder*, yang diukur dari penilaian berbagai indikator pada visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 dan direfleksikan kedalam target – target pada RKPD Kota Binjai tahun 2025.

Visi Pembangunan Kota Binjai 2025-2029

**“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”**

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai- nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang

berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.

2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Binjai tahun RKPD tahun 2025 dari RPJMD Kota Binjai tahun 2025-2029 dapat terselenggara dengan baik dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Keberhasilan diatas dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang baik antara Kepala Daerah dengan unsur Pimpinan maupun anggota DPRD Kota Binjai, Unsur FKPD, Instansi Vertikal Pemerintah, Swasta dan segenap Element Masyarakat di Kota Binjai. Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan urusan Desentralisasi baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Pada masa – masa mendatang, Pemerintahan Kota Binjai akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan penerapan penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mewujudkan Visi serta Misi Kota Binjai, yaitu Kota Binjai sebagai Kota cerdas yang layak huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan menuju Binjai Sejahtera.

Keberhasilan pembangunan dalam berbagai kehidupan Masyarakat, tidak terlepas dari etiked baik, kerja keras, kreatifitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan perannya masing – masing. Demikian juga dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat terselenggara dengan baik dan tidak terjadi gesekan, konflik atau hal – hal yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini tercapai atas dukungan, sinergitas dan koordinasi serta kerja sama yang terbangun dengan baik dengan DPRD, Unsur FKPD dan seluruh elemen Masyarakat Kota Binjai.

Namun, disadari bahwa masih banyak hal – hal atau keinginan masyarakat yang belum terpenuhi, namun Pemerintah Kota Binjai telah melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin dan kedepan diharapkan Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan Kota Binjai dapat semakin baik, peningkatan Ekonomi dan Ketahanan keluarga serta upaya memajukan Kota Binjai sebagai Kota Idaman bagi semua masyarakatnya, Kota yang berdaya saing, Kota yang modern dan Kota yang cerdas dapat lebih tercapai di 3 (tiga) tahun RKPD berikutnya.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Binjai senantiasa mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak dan elemen Masyarakat Kota Binjai, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing – masing, baik perseorangan maupun kolektif.

Akhirnya, demikian laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Binjai Tahun 2025 ini disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluyasi Pemerintah serta dalam rangkla peningkatan Pembangunan Kota Binjai kedepan.

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
(RLPPD)**

**1. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Capaian Kinerja Makro meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Binjai dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,67	79,20	0,67
2	Angka Kemiskinan	4,75	4,71	4,02
3	Angka Pengangguran	5,44	5,37	-1,29
4	Pertumbuhan Ekonomi	15.588,75	16.644,36	6,77
5	Pendapatan Per Kapita	50.749,60	53.530,55	6,44
6	Ketimpangan Pendapatan	0.3180	0.320	2,56

**2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kota Binjai pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kerja Tahun 2024	Capaian Kerja Tahun 2025
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	30,65	25,47
2.	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTS)	79,39	82.12
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0	54.15

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Binjai Tahun 2025 sebesar Rp. 203.367.359.436,60 (dua ratus tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam koma enampuluh rupiah) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Program/kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	83.536.516.444,54	32.760.526.652,13
2.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.785.577.663,00	4.490.324.295,00

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pendidikan di Kota Binjai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;
- b. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar;

- c. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan Standar Nasional
- d. Guru bersertifikasi pada layanan PAUD masih rendah, belum semua anak usia 5-6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD;
- e. Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik;
- f. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kota Binjai pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kerja Tahun 2024	Capaian Kerja Tahun 2025
1.	Persentase Angka Kematian Ibu	0	0,11
2.	Persentase Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	0	0,69
3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	92,74	92,13
4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	90,31	86,75
5.	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	93,99	88,79
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	49,94	57,65
7.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	76,77	94,85

8.	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	26,66	53,86
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,61	74,71
10.	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	48,08	46,10
11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	76,91	90,45
12.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	68,70	100
13.	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	112,95	100
14.	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	55,95	65,14

#### B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Binjai Tahun 2025 sebesar Rp. 123.845.586.166,86 (seratus dua puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma delapan puluh enam rupiah) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Program/kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.184.961.009,00	49.272.878.496,86
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	791.053.071,00	647.567.405,00

	Daya Manusia Kesehatan		
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	517.233.000,00	433.314.488,00
4 .	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	357.299.200,00	40.800.000,00
5 .	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.184.961.009,00	49.272.878.496,86

### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Kota Binjai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih pada fasilitas kesehatan pemerintah masih kurang;
- b. Masih rendahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor terkait dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan
- c. Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- d. Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas;
- e. Warga mendapatkan pelayanan kesehatan di luar wilayah kerja Kota Binjai;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan diri untuk Skrining penyakit;
- g. Sasaran yang digunakan sebagai pembanding masih menggunakan sasaran estimasi bukan sasaran riil;
- h. Tidak maksimalnya penggunaan anggaran karna tidak disusun berdasarkan analisis masalah di puskesmas;
- i. Rendahnya sistem pencatatan dan pelaporan penderita;
- j. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat;

- k. Masih tingginya stigma dan diskriminatif terhadap penderita penyakit menular;
  - l. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal;
  - m. Masih belum terintegrasi pelaporan dan perencanaan ditingkat Puskesmas dengan Dinas Kesehatan;
  - n. Dukungan dan peran serta masyarakat masih kurang terhadap upaya preventif dan promotif.
3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh oleh Kota Binjai pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kerja Tahun 2024	Capaian Kerja Tahun 2025
1.	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	0	Tidak Ada Irigasi
2.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	83,66	75,79
3.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	59,04	18,53
4.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	1,55	5,49
5.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	0	9,95
6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan	0	Tidak Ada Pantai

	permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota		
7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota	100	
8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	0	
9.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memilikisertifikat kompetensi	0	Tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran
10.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian KegiatanPemanfaatanRuang yang sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	Blm ada ikk	100

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kota Binjai Tahun 2025 sebesar Rp. 65.905.283.118,29 (enam puluh lima milyar Sembilan ratus lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas koma dua puluh sembilan rupiah) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Program/kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.567.513.000,00	8.390.238.130,00
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.957.420.006,00	3.879.225.836,00

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan di Kota Binjai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya data sanitasi yang valid sebagai database yang akurat.
- b. Belum tersedianya regulasi seperti Peraturan Daerah yang mewajibkan setiap bangunan gedung untuk memiliki tangki septik yang sesuai Standar Nasional Indonesia serta mengatur pengelolaan air limbah domestik.
- c. Sulitnya kondisi lahan di bagian hilir pemukiman yang mengakibatkan keterbatasan dalam hal pembangunan tangki septik baik itu individual maupun komunal.
- d. Masih minimnya kesadaran masyarakat khususnya Kelompok Penerima dan Pengelola (KPP) Tangki Septik Komunal dalam hal perawatan bangunan;
- e. Minimnya armada sedot tinja,
- f. Terbatasnya Anggaran untuk pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang aman.

#### 4. Urusan Perumahan

##### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Perumahan yang diperoleh oleh Kota Binjai pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kerja Tahun 2023	Capaian Kerja Tahun 2024
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0	0
2.	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	32,58	0
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	0	0
4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	29,03	0

## B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja Urusan Perumahan di Kota Binjai Tahun 2025 sebesar Rp. 12.078.814.648,24 (dua belas milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh delapan koma dua puluh empat rupiah) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Program/kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Program Pengembangan Perumahan	435.015.719	376.082.571
2.	Program Kawasan Permukiman	223.600.000	0
3.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	14.066.993.032	11.702.732.077,24

## C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan di Kota Binjai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Ancaman bencana di Kota Binjai antara lain banjir dan angin puting beliung
- b. Beberapa kecamatan di Kota Binjai yang masuk ke dalam kawasan rawan banjir.
- c. Banyaknya masyarakat Kota Binjai yang tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya seperti pada daerah sepadan sungai (DSS), daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan daerah rawan bencana. Belum adanya pembinaan kepada masyarakat terkait tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, sehingga sulit untuk melakukan relokasi.

## 5. Urusan Trantibumlinmas

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Trantibumlinmas yang diperoleh oleh Kota Binjai pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kerja Tahun 2024	Capaian Kerja Tahun 2025
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Belum ada ikk	0
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	57,14	57,14
3.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100	100
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.5	0
5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100

#### B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

Realisasi belanja Urusan Trantibumlinmas di Kota Binjai Tahun 2025 sebesar Rp. 23.708.087.138 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan juta tiga delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

N O	Program/kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.858.557.184,00	3.951.357.356,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	9.341.908.499,00	9.241.316.993,00

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Trantibumlinmas di Kota Binjai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih pada fasilitas trantibumlinmas pemerintah masih kurang;
- b. Masih rendahnya komitmen dan koordinasi lintas sektor terkait

- dalam mendukung pelaksanaan pelayanan trantibumlinmas;
- c. Sasaran yang digunakan sebagai pembanding masih menggunakan sasaran estimasi bukan sasaran rill;
  - d. Tidak maksimalnya penggunaan anggaran karna tidak disusun berdasarkan analisis masalah di trantibumlinmas;
  - e. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan trantibumlinmas yang belum memadai mengakibatkan akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan trantibumlinmas yang belum maksimal;
  - f. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu;
  - g. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghadapinya serta kebutuhan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan;
  - h. Belum tersedianya Renkon skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana;
  - i. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana;
  - j. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor;
  - k. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana;
  - l. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana;
  - m Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Binjai yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan pemerintah kab/kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

## 6. Urusan Sosial

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Binjai pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kerja Tahun 2024	Capaian Kerja Tahun 2025
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang	100	37,86

	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	1400
4.	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	1400
6.	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Ikk baru	24,14

#### B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kota Binjai Tahun 2025 sebesar Rp. 4.683.642.673,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	Program/kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Program Pemberdayaan Sosial	170.787.699,00	40.800.000,00
2.	Program Rehabilitasi Sosial	140.339.800,26	103.562.969,00
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	71.854.727,00	52.721.500,00
3.	Program Penanganan Bencana	401.224.496,00	337.615.464,00

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Trantibumlinmas di Kota Binjai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kemiskinan di Binjai masih tinggi;

- b. Belum sepenuhnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani;
- c. Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan korban bencana;
- d. Belum semua jenis layanan yang ada dalam SPM Urusan Sosial dilaksanakan (Baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 90 Tahun 2019 );
- e. Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan permakanan, penyediaan sandang, dan penyediaan perbekalan kesehatan belum diberikan kepada penerima sasaran;
- f. Terbatasnya kapasitas SDM dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pemenuhan SPM, terutama dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada penerima layanan SPM;
- g. Kurang mendukungnya sarana dan prasarana aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;

### **3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

#### 1. Hasil EPPD Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kota Binjai berhasil mendapatkan score kinerja 2,7697 dan status kinerja Sedang.

Sedangkan EPPD Tahun 2025 berdasarkan LPPD Tahun 2024 belum dikeluarkan nilai oleh Kemendagri.

#### 2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Nomor 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, Kota Binjai berhasil mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai.

#### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Binjai (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kota Binjai Tahun 2025 mencapai sebesar **1.077.945.428.948,65** dan Realisasi Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2025 mencapai **1.000.371.755.605,84**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.068.759.825.035,00</b>	<b>1.051.820.767.598,22</b>	<b>98,42</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.221.707.621,00	166.622.818.410,22	92,45
PENDAPATAN TRANSFER	867.518.117.414,00	865.704.369.215,00	99,79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	21.020.000.000,00	19.493.579.973,00	92,74
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.077.945.428.948,65</b>	<b>1.000.371.755.605,84</b>	<b>92,80</b>
BELANJA OPERASI	949.485.403.140,65	899.754.999.917,29	94,76
BELANJA MODAL	127.390.673.634,81	100.416.755.688,55	78,83
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.069.352.173,19	200.000.000,00	18,70

#### 5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah 2025 Kota Binjai memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO	Pelaksanaan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan (SMP N 14)	COLLABORATIVE TEACHING MELALUI MOPEN (MOVING AND OPEN) CLASS BERBANTUAN PLATFORM PADI KAPAS	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler)
2.	Dinas Pendidikan (SD Negeri 027143)	D-SMART (Digital School Management and Administration Real-Time)	Program Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah (Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb))
3.	Dinas Sosial	SAPA KASIH ( Sistem Asuhan dan Pendampingan Orang Terlantar Kehilangan Keluarga Secara Holistik )	Program Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Pengemis di Luar Panti Sosial)
4.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Terpadu, Perizinan dan "ADA SALWA" (Aduan dan saran Layanan Melalui WA 082162186660	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas)
5.	BAPPERIDA	Binjai Menilai	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Pengembangan Inovasi dan Teknologi)
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIKAKAK Siap Kartu Keluarga Kutipan Akta Lahir dan KIA	Program Pendaftaran Penduduk (Penataan Pendaftaran Penduduk)
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PAKET CANTIK	Program Pendaftaran Penduduk (Penataan Pendaftaran Penduduk)
8.	Bagian Hukum Setdako Binjai	BANG JAI (ABANG ADMIN JDIH KOTA BINJAI)	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum)

9.	Puskesmas Jati Makmur	SADAR MANJUR MAS JAMUR (perikSA Dahak secara Rutin dan Minum Obat Teratur puskesMAS JAti makMUR)	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)
10.	Kecamatan Binjai Barat	Pembentukan Kampung Tahu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan)
11.	Dinas Perhubungan	DIPERALIS (Digitalisasi Perancangan Peta Rekayasa Lalu Lintas)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jlaan (LLAJ) (Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota)
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	"AMIR JEMPOL" Aksi Melayani Izin Berusaha Jemput Bola	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	e-REPTIL	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa (Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)